

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DI DINAS SOSIAL DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN  
BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau Pekanbaru



**ANGGRENI ISRAWATI**

**NPM : 167110845**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU**

**2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Anggredi Israwati  
NPM : 167110845  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul UP : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam Skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian Ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian Konferehensif.

Turut Menyetujui

Pekanbaru, 02 November 2020

Program Studi Administrasi Publik

Pembimbing,

Ketua,



Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si



Arief Rifai H. S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Anggreni Israwati  
NPM : 167110845  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul UP : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 02 November 2020

Ketua

Arief Rifai H, S.Sos.I.MPA

Sekretaris

Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Anggota,

Dr. H. A Tarmizi Yussa, MA

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Indra Safri, S.Sos., M.Si



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

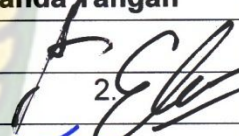
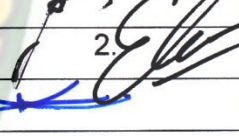
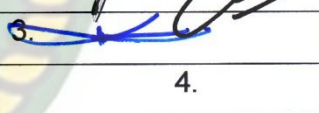
=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1029/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 21 Oktober 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 22 Oktober 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Anggreni Israwati  
NPM : 167110845  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

Nilai Ujian : Angka : " 79 " ; Huruf : " B+ "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Arief Rifai H, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Anggota	3. 
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 22 Oktober 2020

An. Dekan,



**Indra Safri, S.Sos, M.Si**

Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1029/UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti-Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Anggreni Israwati  
N P M : 167110845  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

**Struktur Tim :**

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Arief Rifai H, S.Sos., M.Si  | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA    | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA. | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2020  
Dekan,



**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK. 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. A r s i p -----sk.penguji-----



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anggreni Israwati  
NPM : 167110845  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul UP : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan menyempurnakan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 02 November 2020

Ketua

Arief Rifai H, S.Sos.I.MPA

An. Tim Penguji

Sekretaris

Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan 1,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik

Ketua,

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah swt penulis ucapkan, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”.

Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahannya terdahulu. Dengan mengucap “Allahumma Sholli’ ala Muhammad Wa’alaa Alihi Syayidina Muhammad’ yang telah memberikan suri teladan dan pengajaran, sehingga terbuka lah berbagai hikmah Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Ilmu Administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani S.Sos, M.Si Selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Publik dan jajaran dosen pada jurusan Ilmu Administrasi yg telah memfasilitasi serta membagi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. Bapak Eko Handarian S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik, yang juga turut memberikan motivasi membimbing penulis dalam penulisan dan penyusunan Usulan Penelitian ini.
5. Bpk Arief Rifai Harahap.,S.Sos.,M.Si selaku pembimbing yang telah berkenaan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta masukan kepada penulis selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Usaha Penelitian ini.
7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Usulan Penelitian ini.
8. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis beserta jajarannya yang telah memberikan informasi kepada peneliti membantu penulis dalam pengumpulan data Usulan Penelitian ini.
9. Teristimewa Buat Orang Tua tercinta terutama Ayahanda Mispan (Alm) dan Ibunda katijem yang telah mencurahkan kasih sayang yang berlimpah serta berkat usaha dan doa merekalah penulis dapat melewati tahap demi tahap perkuliahan serta penulisan Usulan Penelitian ini.
10. Kepada Abang ku Ade Saputra dan kakak ku Titie Nelfiani, Wiwik Soneta, Indah Novita Sari, serta Adek Sepupu ku Heyreni Yusnita dan Ellin kartika pratiwi yang selalu memberikan semangat serta motivasinya untuk penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
11. Sahabat-sahabat Nuris Syakila, Siti Nurbaya, Merliana Nurfitriah, Irma Atb, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan Usulan penelitian ini.



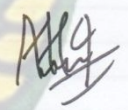
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Publik Angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberi pahala atas jasa dan kebaikan mereka semua dan penulis sadar bahwa Skripsi ini masih banyak Kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan usulan penelitian adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Pekanbaru, 02 November 2020

Penulis,



Anggreni Israwati

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA KONFEREHENSIF SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumus Masalah .....	13
C. Tujuan dan kegiatan Penelitian .....	14
1. Tujuan Penelitian .....	14
2. Manfaat Penelitian .....	14

<b>BAB II KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>16</b>
A. Studi Kepustakaan .....	16
1. Konsep Administrasi .....	17
2. Konsep Organisasi .....	20
3. Konsep Manajemen .....	22
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	24
5. Konsep kebijakan.....	28
6. Konsep kebijakan publik .....	30
7. Konsep Implementasi .....	33
8. Program Keluarga Harapan .....	42
9. Pemberdayaan.....	43
B. Kerangka Pikir .....	45
C. Hipotesis.....	46
D. Konsep Operasional .....	47
E. Operasional Variabel .....	49
F. Teknik Pengukuran.....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Tipe penelitian .....	57
B. Lokasi Penelitian .....	58
C. Populasi dan sampel.....	58
D. Teknik Penarikan sampel .....	59
E. Jenis dan Sumber Data .....	60
F. Teknik Pengumpulan Data .....	61
G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis .....	62
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	63
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	64
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis .....	66
B. Profil Singkat Kecamatan Bantan .....	69



C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis .....	70
D. Fungsi dan Tujuan Organisasi .....	73
E. Sumber Daya Organisasi .....	73
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
A. Identitas Responden .....	80
1. Tingkat Usia .....	80
2. Jenis Kelamin .....	81
3. Tingkat Pendidikan .....	82
B. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. ....	83
1. Komunikasi .....	83
2. Sumber Daya .....	104
3. Disposisi .....	126
4. Struktur Birokrasi .....	142
C. Faktor Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	160
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>162</b>
A. Kesimpulan .....	162
B. Saran .....	163
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>164</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>167</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
I.1 Rincian Bantuan PKH Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	5
II.1 Operasional Variabel Penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	50
III.1 Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	59
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.....	63
IV.1 Luas Wilayah dan jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis .....	68
IV.2 jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 .....	74
V.1 Identitas Responden Penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin .....	81
V.2 Identitas Responden Penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Tingkat Usia .....	81
V.3 Identitas Responden Penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	82

V.4a. Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sukamaju mengenai Indikator Komunikasi terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	84
V.4b. Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pasiran mengenai Indikator Komunikasi terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	86
V.4c. Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Jangkang mengenai Indikator Komunikasi terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	88
V.5a. Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sukamaju mengenai Indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	91
V.5b. Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pasiran mengenai Indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	93
V.5c. Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Jangkang mengenai Indikator Sumber Daya terhadap	



Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	95
V.6a. Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sukamaju mengenai Indikator Disposisi terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	98
V.6b. Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pasiran mengenai Indikator Disposisi terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	100
V.6c. Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Jangkang mengenai Indikator Disposisi terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	102
V.7a. Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sukamaju mengenai Indikator Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	105
V.7b. Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pasiran mengenai Indikator Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	107

V.7c. Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Jangkang mengenai Indikator Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....109

V.8a. Rekapitulasi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sukamaju Mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....122

V.8b. Rekapitulasi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pasiran Mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....114

V.8c. Rekapitulasi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Jangkang Mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....116

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
I.1 Grafik Penerima Bantuan PKH Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	8
II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	46
IV.1 : Peta Wilayah Kabupaten Bengkalis .....	67
IV.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	72





## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Daftar Kuisisioner untuk Responden Penerima Bantuan PKH Di Desa Sukamaju mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....167
2. Daftar Kuisisioner untuk Responden Penerima Bantuan PKH Di Desa Pasiran mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....179
3. Daftar Kuisisioner untuk Responden Penerima Bantuan PKH Di Desa Jangkang mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....191
4. Daftar Wawancara untuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten bengkalis mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....203
5. Daftar Wawancara untuk Kepala Bidang Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....204
6. Rekapitulasi Telly Kuesioner Tanggapan Responden Di Desa Sukamaju mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....156
7. Rekapitulasi Telly Kuesioner Tanggapan Responden Di Desa Pasiran mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....157
8. Rekapitulasi Telly Kuesioner Tanggapan Responden Di Desa jangkang mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....158
9. Dokumentasi Foto Peneliti Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....205
10. Surat Rekomendasi Dari Ketua Program Studi dan Wakil Dekan 1 Usulan Dosen Pembimbing .....220
11. Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .....221
12. Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau .....222
13. Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Bengkalis.....223
14. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian Dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis .....224

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggreni Israwati  
NPM : 167110845  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Public  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul UP : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah:
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas:
3. Bahwa, apabila ia kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 November 2020

Pelaku Pernyataan,



Anggreni Israwati

# IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH DINAS SOSIAL KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

## ABSTRAK

Oleh

Anggreni Israwati

Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Indikator Penilaian yang digunakan yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Tipe Penelitian ini adalah Survey deskriptif Kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar Kuisisioner sebagai alat Pengumpulan Data dan Data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas keberadaan tujuan pada lokasi penelitian. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 92 orang. Adapun faktor penghambatnya adalah Penyalahgunaan dana PKH terhadap peserta penerima PKH, yang seharusnya dana PKH tersebut digunakan untuk keperluan dibidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tetapi malah dipergunakan untuk kegunaan diluar itu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya optimal, dikarenakan masih banyak nya penyalahgunaan dana PKH yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap penerima Bantuan Program Keluarga Harapan PKH. Maka dari itu Pemerintah pusat lebih teliti lagi dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH).



IMPLEMENTATION OF THE HOPE FAMILY PROGRAM (PKH) BY THE  
SOCIAL DINAS KECAMATAN BANTAN BENGKALIS DISTRICT

ABSTRACT

BY

Anggreni Israwati

This study shows that the implementation of the Family Hope Program (PKH) by the Social Service of Bantan District, Bengkalis Regency. The assessment indicators used are Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. This type of research is a quantitative descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a means of collecting data and the data collected by this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions and the objectivity of the existence of objectives at the research location. The population and sample in this study amounted to 92 people. The inhibiting factor is the misuse of PKH funds against PKH recipient participants, which PKH funds should be used for purposes in the fields of health, education and social welfare but are instead used for other uses. The results of this study indicate that the implementation of the Family Hope Program (PKH) by the Bantan District Social Service, Bengkalis Regency, is not fully optimal, because there are still many misuse of PKH funds provided by the central government to recipients of PKH Hope Family Program Assistance. Therefore, the central government is more careful in carrying out its duties.

Keywords : Implementation, Of The Hope Family Program (PKH).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tanah yang sangat luas, selain itu Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun pada kenyataannya Indonesia tidak luput dari masalah kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan menggambarkan belum berhasilnya upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pengetasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat miskin. Kemiskinan adalah permasalahan pokok yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia. Walaupun tidak dikatakan seluruhnya, dengan berbeda-beda tingkat dan jumlah orang miskin pada setiap negara, hampir tidak ada satu negara yang dapat terbebas dari masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah umum dan telah menjadi ancaman serta bencana bagi suatu negara. Dunia mengalami kemajuan teknologi di setiap zamannya, berlangsungnya kebangkitan dan meluasnya penggunaan alat dalam industri, namun kemiskinan masih menjadi beban yang harus diurus oleh pemerintah. Kemiskinan juga dialami oleh negara yang memiliki sumber daya alam seperti Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat serius agar harus segera diatasi. Untuk mencari solusi yang relevan dalam memecahkan masalah kemiskinan, perlu dipahami sebabnya dan menelusuri akar permasalahan kemiskinan itu. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya

selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dari segi kualitas atau sejumlah masyarakat, baik di desa maupun di kota.

Penduduk miskin digambarkan dengan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, meliputi sandang, pangan, dan papan. Pendapatan yang kurang pun menjadi hal yang sangat mempengaruhi kualitas hidup. Penduduk miskin pun memiliki kualitas hidup yang rendah. Sehingga, penduduk miskin sulit untuk mengakses layanan kesehatan yang memadai, mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Sulit bagi mereka untuk dapat mengubah nasibnya dari kondisi miskin menuju kondisi yang lebih baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain terutama dari pihak pemerintah.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan Kotanya adalah Bengkalis tepatnya berada dipulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Luas Kabupaten Bengkalis adalah 7.793,93 km. Kabupaten Bengkalis terletak di sebelah timur Pulau Sumatera yang mencakup area seluas 7.793,93 km dengan batas utara berbatasan dengan Selat Malaka, batas selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak, batas barat berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu, batas timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun. Adapun nama Bengkalis diambil dari kata Mengkal artinya sedih atau sebak dan kalis yang berarti tabah, sabar dan tahan ujian dan digabung menjadi Mengkalis dan Sebutan Mengkalis sering disebut Bengkalis.



Bengkalis merupakan Daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 m dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau) serta 24 pulau besar dan kecil. Beberapa di antara Pulau besar itu adalah Pulau Rupat (1.524,84 km) dan Pulau Bengkalis (938,40 km). Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 11 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 136 Desa. Di Kecamatan Bantan memiliki 23 Desa. Kabupaten Bengkalis banyak memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan seperti dibidang perkebunan, pertanian dan perikanan. Sebagian penduduk ada yang bekerja di bidang Rumah Sakit, Guru, perkantoran dan lain sebagainya.

Dinas Sosial merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus ditempuh oleh pemerintah. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua,

memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Penerima bantuan ini adalah Ibu Hamil, Balita, Anak Usia Sekolah, Lansia dan Distabilitas berat. sumber dana bantuan (PKH) yang di berikan kepada Rumah tangga sasaran berasal dari APBN. Keluarga yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) disebut rumah tangga sangat miskin (RTSM).

PKH atau Program Keluarga Harapan adalah Program Pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga Miskin yang terdaftar di data pusat dengan sumber BPS dikelola oleh TNPPK (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yang disebut KPM atau Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ini dalam arti harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Jika salah satu persyaratan PKH tersebut terpenuhi maka KPM PKH berhak mendapatkan Kartu PKH, meskipun mereka dalam keadaan miskin jika tidak mempunyai syarat yang ditentukan oleh kementerian sosial seperti komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial, Maka dari itu jika tidak didaftarkan maka tidak disebut sebagai peserta (PKH). Komponen kesehatan seperti ibu hamil, balita bayi umur 5 tahun dan termasuk juga pra sekolah dalam arti 6 tahun tetapi belum masuk sekolah. Komponen pendidikan ini seperti SD, SMP, SMA, untuk komponen kesejahteraan sosial seperti lansia dan distabilitas berat, lansia ditentukan usianya wajib 70 tahun keatas tidak boleh kurang atau lebih dari usianya. Distabilitas berat dalam arti tuna netra dan keterbelakangan mental.

Tabel 1.1

## Rincian Bantuan PKH Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

NO	FAKTOR PENIMBANG	INDEKS BANTUAN (RP) 2019
1	Bantuan Tetap PKH Reguler	550.000
2	Bantuan Tetap PKH Akses	1,000,000
3	Kategori Ibu Hamil	2.400.000
4	Kategori Anak Usia 0 s.d. 6 Tahun	2.400.000
5	Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat	900.000
6	Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat	1.500.000
7	Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat	2.000.000
8	Kategori Penyandang Disabilitas Berat (PDB)	2.400.000
9	Kategori Lanjut Usia (Lansia) 70 Tahun ke Atas	2.400.000

*Sumber : pedoman operasional penyaluran dana bantuan PKH 2020*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pembayaran bantuan dilakukan bantuan tetap diberikan kepada peserta PKH Reguler adalah Rp. 550.000,- dan PKH Akses Rp. 1.000.000,- jika peserta memiliki anak usia di bawah 6 tahun dan ibu hamil/menyusui maka bantuan akan ditambah Rp. 2.400.000,- jika memiliki anak peserta pendidikan setara SD/Sederajat akan bertambah lagi Rp. 900.000,- SMP/Sederajat akan bertambah lagi Rp. 1.500.000,- dan akan bertambah lagi Rp. 2.000.000,- jika peserta memiliki anak peserta pendidikan SMA/Sederajat. Kategori penyandang disabilitas berat (PDB) dan lanjut usia (Lansia) 70 tahun ke atas Rp. 2.400.000,- selain itu penerima PKH



berhak mendapatkan bantuan program-program lain contohnya bantuan beras bulog, kartu Indonesia pintar dan Kartu Indonesia sehat.

Bantuan ini berupa sosial bersyarat bantuan ini berupa uang, dulu penyalurannya secara tunai namun semenjak 2017 itu non tunai dalam arti ditransfer dari kementerian melalui rekening nasabah langsung tanpa prantara ditransfer ke rekening (KPM) sesuai dengan nominal atau sesuai dengan komponen yang mereka miliki, seperti anak SD 900 ribu 1 tahun penyalurannya setiap 3 bulan sekali bulan januari, april, juli, dan oktober 4 kali dalam 1 tahun. Mengapa bantuan (PKH) ini berbeda-beda tidak sama antara A dan B, KPM 1 dan KPM 2 karna tergantung dengan komponen yang mereka miliki. Jika mereka hanya memiliki 2 anak SD dihitungkan 1 900 ribu pertahun jika 2 menjadi 1.800 ribu. Anak balita lebih besar 3 juta pertahun namun balita dikurangi menjadi 2 komponen tidak boleh lebih jika ada 3 orang yang diberi hanya 2 orang, begitu juga dengan distabilitas dan lansia 2.400 ribu, SD 900 ribu, SMP 1.500 ribu dan SMA 2.000.000 juta, Untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana, misalnya uang bantuan buat kesalon, shopping, dan lain sebagainya itu bukan menjadi harapan atau tujuan program keluarga harapan (PKH). Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi hak sepenuhnya bagi sasaran untuk merubah sebagai permasalahan hidup yang dialaminya, agar tidak terjadi penyimpangan dibantu kelembagaan yang mengawasi penggunaan dana tersebut.

Adapun syarat-syarat sebagai peserta PKH adalah sebagai berikut :

A. Memiliki komponen fasilitas kesehatan seperti :

- Ibu hamil

- Balita
- Anak PRA - Sekolah (APRAS)

B. Memiliki komponen fasilitas pendidikan :

- SD, SMP & SMA/SMK Sederajat

C. Memiliki komponen kesejahteraan sosial :

- Lanjut usia Minimal 60 Tahun
- Penyandang Disabilitas Berat.

Kewajiban sebagai peserta KPM PKH yaitu sebagai berikut :

- 1) Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemenuhan gizi untuk balita dan pemeriksaan kandungan untuk ibu hamil ke puskesmas terdekat.
- 2) Memiliki anak yang terdaftar di sekolah atau pendidikan kesetaraan dengan minimal 85% kehadiran dikelas setiap bulannya.
- 3) Untuk lansia melaksanakan pemeriksaan kesehatan di puskesmas terdekat.
- 4) Untuk distabilitas berat melaksanakan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan melalui kunjungan kerumah (Home Care).

Dalam menanggulangi kemiskinan Program PKH menjadi prioritas utama yang sudah dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

namun demikian hasil optimal, salah satunya ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah diatasi, mengingat kemiskinan merupakan masalah yang bersifat *multidimensial*. *multidimensial*

merupakan situasi yang dialami oleh suatu bangsa dimana terjadi berbagai pertentangan baik besar maupun kecil dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan juga kebobrokan moral.

Program (PKH) Mulai di laksanakan di indonesia pada tahun 2007 tempatnya didaerah jawa sebagai proyek objeknya, Namun di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis mulai pelaksanaannya sejak tahun 2014, pada tahun 2013 masih mengajukan proposal tahun 2014 bulan agustus ditetapkan sebagai proyek proyek ditetapkan sampai sekarang sudah memasuki 7 tahun lamanya.

Faktor penyebab (PKH) ini masih ada di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis salah satunya masih ada orang miskin, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat mendukung dan masih menyetujui bahwa program (PKH) ini program yang layak untuk diterapkan oleh indonesia. Berdasarkan yang sudah disampaikan oleh presiden jokowi sangat mendukung sekali dengan adanya program ini, karna dengan (PKH) ini rasio kemiskinan sudah mulai menurun pertama dengan angka 2 diji dan sekarang menjadi angka 1 diji.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut dengan memberikan bantuan secara non tunai dan memberikan bekal dalam menciptakan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Bantuan non tunai tersebut guna membantu pembiayaan sekolah dan jaminan kesehatan. Sedangkan pembelajaran keahlian dibekali keterampilan seperti pembuatan tas, daur ulang dari plastik bekas bungkus kopi, pembuatan snack-snack ringan, dan pembuatan pernak-pernik lainnya. Dan juga peserta Program Keluarga Harapan dibekali cara memasarkanya produk-produk yang dibuatnya agar produk yang dibuatnya itu

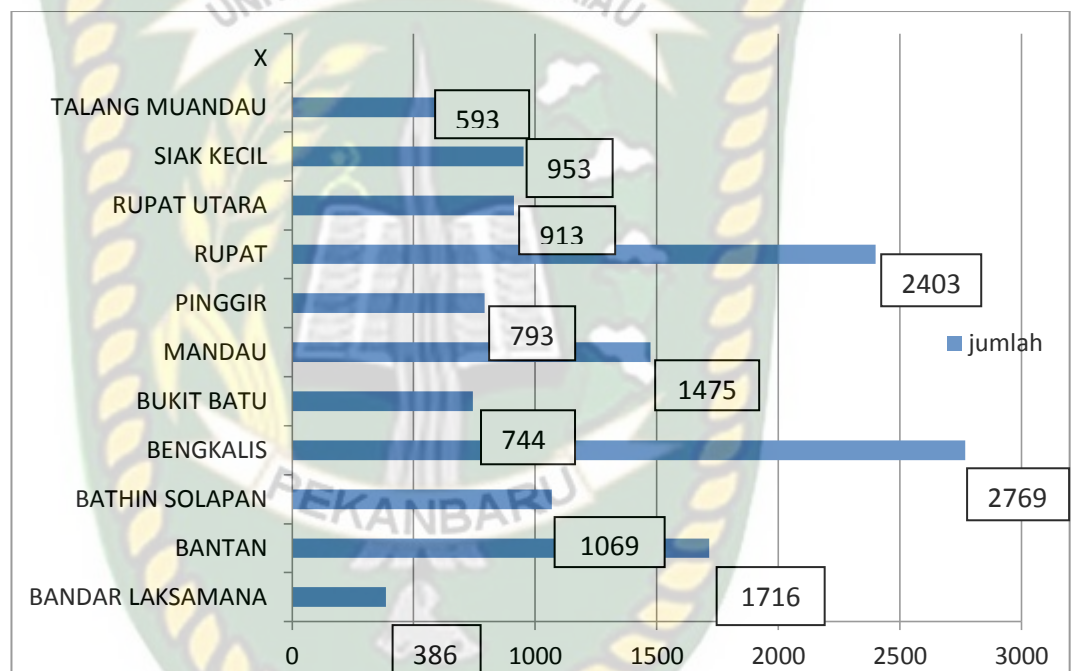


terus berkembang dan dapat mandiri. Dengan adanya Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak bergantung dengan bantuan non tunai karena sudah dibekali keahlian tersebut.

**Gambar 1.1**

**Grafik Penerima Bantuan PKH Di Kecamatan Bantan**

**Kabupaten Bengkalis**



*Sumber : Data UPPKH Kabupaten Bengkalis 2020*

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa pemberian manfaat Program PKH telah mencakup keseluruhan Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dengan total 12.212 KSM pada tahun 2019.

Tanggapan Dinas Sosial khusus sebagai pelaksana (PKH) Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis program ini sangat membantu bagi kalangan masyarakat, bantuan (PKH) ini untuk memutuskan rantai kemiskinan untuk jangka yang panjang. Tujuan (PKH) ini agar anak bisa terus lanjut sekolah tanpa

ada putus sekolah, agar ketika tamat sekolah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak supaya tidak mengikuti jejak orang tua yang hanya tamatan SD, SMP, atau SMA.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, maka ditemui beberapa fenomena yaitu :

1. Penyalahgunaan dana PKH terhadap peserta penerima PKH, yang seharusnya dana PKH tersebut digunakan untuk keperluan dibidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tetapi malah dipergunakan untuk kegunaan diluar itu.
2. Masih kurangnya petugas Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada penerima bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga tidak semua penerima bantuan dalam program keluarga harapan (PKH) memperoleh layanan dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul yaitu :

**“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden. Menurut Subarsono (2005:88) implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk

mempengaruhi apa yang oleh lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas dan untuk mempermudah pemahaman permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka peneliti tertarik untuk menarik rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

- **Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

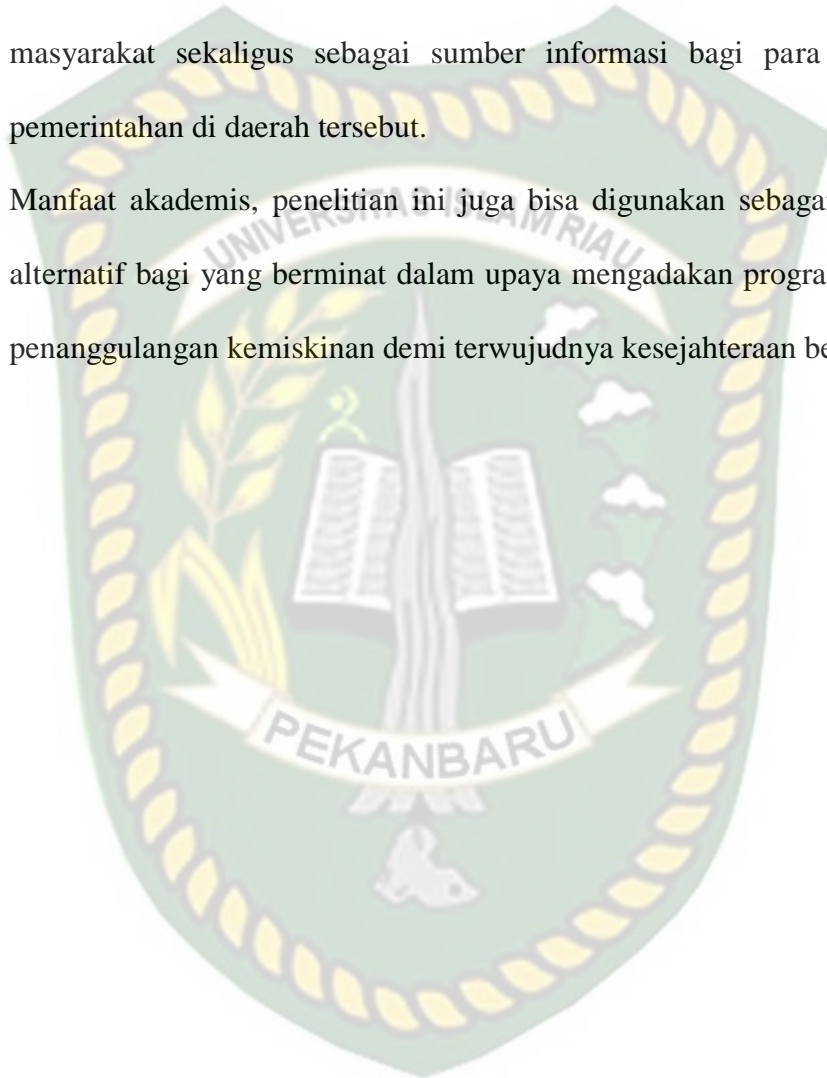
- **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambahkan wawasan berfikir kita tentang berbagai cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan segala macam permasalahan yang mengedepankan

tanggung jawab sosial.

- b. Manfaat praktis, penelitian ini berguna menambahkan ilmu pengetahuan baik semua kalangan, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai sumber informasi bagi para pemegang pemerintahan di daerah tersebut.
- c. Manfaat akademis, penelitian ini juga bisa digunakan sebagai informasi alternatif bagi yang berminat dalam upaya mengadakan program-program penanggulangan kemiskinan demi terwujudnya kesejahteraan bersama.





## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan adanya konsep landasan atau pedoman sebagai dasar untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam sebuah penelitian.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “mensejahterakan kehidupan bangsa”, maka sebuah negara perlu dikelola secara serius dan juga secara berkala dengan sebuah manajemen yang jelas. Ketika berbicara mengenai manajemen, tentu sangat identik dengan Negara Indonesia yang menganut sistem desentralisasi dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam sebuah manajemen, karena jika pengelolaannya tidak baik, maka peningkatan kesejahteraan tidak akan terwujud sesuai dengan harapan yang direncanakan.

Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian ini dan akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini membahas tentang sistem pemerintahan atau menyangkut tentang organisasi publik. Dan tentunya didalam sistem pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya manajemen. Manajemen berkembang dan hidup layaknya sebuah sistem. Manajemen hadir dengan peran

yang melekat sebagai penyatu semua unsur tersebut. Dikarenakan sebuah sistem yang baik tidak akan terwujud tanpa bersatunya semua unsur-unsur tersebut. Dan berikut adalah penjelasan beberapa unsur dalam manajemen, antara lain :

### **1. Konsep Administrasi**

Kata “administrasi” berasal dari kata “administration” (to administer). Kata to administer dapat berarti to manage (mengelola) dan to direct (mengerakkan). Ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan. Administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Stephen P. Robbins administrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan melalui orang lain (Robbins, 1983).

Menurut Prajudi Atmosudirjo Administrasi merupakan suatu fenomena sosial yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi.

Menurut Luther Gulick ilmu administrasi adalah suatu sistem pengetahuan dimana olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan meramalkan akibat-

akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama.

Menurut The Liang Gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hadari Nawawi administrasi kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Definisi para ahli tentang administrasi ini sangat banyak sehingga tidak perlu lagi penulis sajikan satu persatu, karena pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu antara lain :

1. Kerja sama
2. Banyak orang, dan
3. Untuk mencapai tujuan bersama.

Pengertian di atas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari, yaitu tata usaha. Mengingat tata usaha merupakan

unsur administrasi dalam arti luas. Secara lengkap unsur-unsur pelaksanaannya tersebut sebagai berikut :

- a. Pengorganisasian
- b. Manajemen
- c. Tata hubungan
- d. Keuangan
- e. Perbekalan
- f. Tata usaha
- g. Perwakilan.

Administrasi Memiliki ruang lingkup yang bergerak meluas dan tidak hanya sebatas proses ketik mengetik surat, pencatatan atau arti sempit lainnya. Dimana semua sumber daya organisasi itu disimpulkan dalam istilah 6M. Dimana 6M itu adalah sebagai berikut:

- a *Man*, yang artinya adalah manusia. Dalam organisasi manusia ini dikenal sebagai sumber daya manusia. Sumber daya adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Karena jika sumber daya manusia suatu organisasi itu berkualitas, maka hidup dari sebuah organisasi pun akan berkualitas.
- b *Money*, artinya uang. Uang yang dimaksud adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala sesuatu pergerakan di dalam organisasi juga membutuhkan financial.



- c Mentod*, yang artinya adalah metode atau cara. Cara yang dimaksud dalam hal ini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam membuat sebuah organisasi itu menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d Machine*, yang artinya mesin. Maknanya adalah bahwa mesin yang dimaksud merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran bergeraknya sebuah organisasi.
- e Material*, adalah materi, bahan, dalam organisasi. Peralatan yang dimaksud disini merupakan bahan baku dan semua peralatan lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
- f Market*, merupakan pasar. Dalam organisasi publik, market akan terealisasi dalam bentuk opini masyarakat. Sementara dalam organisasi privat atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat akhir dalam pemasaran produk.

6 (enam) unsur itu akan menjadi landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam menempatkan diri ditengah-tengah birokrasi pemerintahan secara menyeluruh maupun di dalam perumusan kebijakan.

## **2. Konsep Organisasi**

Organisasi adalah satuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua atau lebih orang yang berfungsi atas dasar yang relatif kontinyu untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama (Robbins, 1986).

Menurut Hebert A. Simon organisasi sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan lain-lain di dalam suatu kelompok orang-orang (Simon, 1958).

Menurut Chester L. Bernard organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerja sama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi (Bernad, 1958).

Menurut Dwight Waldo organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan dan kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem (Waldo, 1955).

Menurut Luther Gulick organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang diberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan (Luther Gulick dalam Sutarto, 1995).

Dari definisi- definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi merupakan antara lain yaitu:

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi.
2. Didalamnya terjadi berbagai hubungan antar-individu maupun kelompok baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar.
3. Terjadinya kerjasama dan pembagian tugas.
4. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Menurut Sondang P. Siagian setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan nama terdapat seorang/beberapa orang yang disebut bawahan (Siagian, 1985).

Menurut Pradjudi Atmosudirdjo organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu (Atmosudirdjo, 1976).

Konsep organisasi (*organization*) nampaknya merupakan titik sentral dari maksud dan tujuan diaplikasikannya setiap aspek studi administrasi. Bahwa keberadaan setiap aspek studi administrasi itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan kebijakan manajerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. (Zulkifli, 2009;15).

Dari berbagai pengertian organisasi menurut para ahli di atas, dapat dipahami bahwa organisasi adalah suatu wadah atau tempat untuk terlaksananya serangkaian proses kerja sama dari orang-orang yang berbeda dalamnya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama.

### **3. Konsep manajemen**

Menurut Donovan dan Jackson mendefinisikan manajemen sebagai proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu (dalam Pasolong 2007:82). Sebagai rangkaian keterampilan (*skill*), dan sebagai serangkaian tugas. Setiap

fungsi manajemen sangat diperlukan untuk mengatur manajemen pada setiap organisasi hingga tercapainya tujuan akhir dari sebuah organisasi. Dari fungsi manajemen tersebut, fungsi penilaian merupakan fungsi akhir manajemen untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan.

Menurut Sondang P. Siagian manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Liang Gie manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan usaha kerja sama yang ditentukan benar-benar dapat tercapai.

Rangkaian aktivitas yang dimaksud merupakan fungsi-fungsi manajemen. Liang Gie membedakan atas enam kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, yaitu pola perbuatan yang menggambarkan hal-hal yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.
2. Pembuatan keputusan, yaitu pola perbuatan melakukan pemilihan keputusan dari alternatif-alternatif yang telah ditentukan dalam penyelesaian masalah.
3. Pembimbingan, yaitu pola perbuatan mendorong semangat bekerja, mengarahkan, karyawan dan memberikan petunjuk.
4. Pengkoordinasian, yaitu pola perbuatan menghubungi-hubungkan dan menyalurkan karyawan-karyawan berikut tugas-tugasnya satu sama lain.



5. Pengontrolan, yaitu pola perbuatan memeriksa dan mencocokkan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana dan hasil yang telah ditentukan.
6. Penyempurnaan, yaitu pola perbuatan memperbaiki tata stuktur data kerja dari usaha kerja sama yang bersangkutan.

Menurut Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.(dalam Zulkifli, 2015;5) dari poin-poin diatas barulah diketahui bahwasannya sangat pentingnya manajemen, baik dari awal pelaksanaan manajemen tersebut hingga hasil akhir dari manajemen tersebut.

#### **4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat di dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karena itulah manusia juga perlu dimanajementi.

Selanjutnya Menurut Hasibuan (2012:10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Sedangkan definisi yang dikemukakan Kiggundu (dalam Faustino. 2003:4) manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional.

Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2012:21-23) antara lain sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan (*Human Resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

Adapun perencanaan juga didefinisikan oleh Louis A.Allen dalam Zulkifli (2009:49) adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan suatu hasil yang diinginkan.

Perencanaan penyusunannya membutuhkan kerangka pemikiran yang konstruktif dari kalangan manajemen organisasi. Sebagai mana yang dijelaskan oleh Siagian dalam Zulkifli (2009:49) bahwa perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Kriteria suatu rencana yang baik menurut Siagian (2009:55) sebagai berikut :

- 1) Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan tujuan organisasi.
- 2) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.
- 3) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan.
- 4) Rencana harus disertai oleh suatu perincian yang teliti.
- 5) Rencana tidak boleh terlepas dari pemikiran pelaksanaan.
- 6) Rencana harus bersifat sederhana.
- 7) Rencana harus *luwes*/fleksibel (perlu adanya pengakalan).
- 8) Didalam rencana terdapat pengambilan resiko.
- 9) Rencana harus bersifat praktis (*praktis*).
- 10) Rencana harus merupakan "*forecasting*".

Teori ini menjelaskan didalam diri pribadi masing-masing pihak manajemen organisasi harus memiliki 'good will'.

#### b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chart*).

#### c. Pengarahan

Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

d. Pengendalian

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

e. Pengadaan

Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

f. Pengembangan

Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

g. Kompensasi

Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

h. Pengintegrasian



Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

i. pemeliharaan

pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pension.

j. Kedisiplinan

kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dari kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

k. Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

## 5. Konsep Kebijakan

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan atau perumusan keputusan dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak menjadi sasaran kebijakan.

Menurut Anderson (1984) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan masalah.

Selanjutnya Anderson (1984: 113) mengklasifikasi kebijakan policy menjadi dua: substantif dan procedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan procedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Menurut Harbani pasolong (2007: 39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa :

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan
3. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif demi kepentingan publik.

Menurut Dunn (2003; 105) perumusan kebijakan adalah suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam

rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penataan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan saran keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terdapat isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan.

## **6. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan yang direkomendasikan untuk dipilih oleh *Policy Markes* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *Policy Markes* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar tersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Menurut Young dan Quin Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum,

politis dan finansial untuk melakukannya (dalam Suharto, 2005:44). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Kemudian menurut Young dan Quinn (dalam Suharto, 2005:44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasi oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, kebijakan publik berupaya merespon masalah/kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang disebut untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat



dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dibuat dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Korayati (2005:7), mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan. Menurut Islamy (2000:17), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Menurut Dunn (dalam Nugroho 2007:10), tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Fase penyusunan agenda, pada fase ini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
2. Fase formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi kebijakan, alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan/atau konsensus kelembagaan.

4. Implementasi kebijakan, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya terutama finansial dan manusia.
5. Penilaian kebijakan, pada fase ini pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan.

## 7. Konsep Implementasi

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (Program), maka sangat bergantung kepada implementasi program itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah diantara diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Hinggis (dalam Pasolong, 2007:57) mendefenisikan implementasi yaitu sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Sedangkan menurut Awang (2010:32) implementasi diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya disampaikan dalam bentuk peraturan perundangan, keputusan politik itu mencakup masalah yang hendak diatasi, tujuan yang hendak dicapai serta untuk memecahkannya.

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden. Menurut Subarsono (2005:88) implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk

mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

menurut Jones (1996) dalam Agustino (2016:154-155) implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu, dimana implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu organization, interpretation, and application yakni sebagai berikut :

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Penerapan

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (*interpretation*), dan penerapan (*applications*), dimaknai sebagai aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber

daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan).

aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Di mana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

Tugas implementasi adalah sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik menjadi hasil dari aktivitas pemerintah dan disamping itu juga implementasi juga menyangkut masalah penciptaan suatu sistem penghantaran atau penyerahan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi kebijakan yaitu sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (dalam Budi 2012:149).

Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model



implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremaikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam pengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu :

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi),

hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkat birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapasitas) dalam mengimplementasikan

kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi; dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan pada implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III adalah :

- a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.



- b. Melakukan pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*), dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.
- c. Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur

birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalanya kebijakan. Birokrasi sehingga pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah :

- a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) lebih fleksibel, SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan didalam konteks manajemen berada didalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika

kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut secara rinci kegiatan didalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui :

- a. Implementasi strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakan dan kepemimpinan
- d. Pengendalian.

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan pengangguran kemiskinan dipedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrat kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan dimulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pengerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

## **8. Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program

penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi Kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Dalam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relative kurang peningkatan kesejahteraan.

Adapun secara khusus, tujuan dari PKH (Pedum PKH 2008, h.12) terdiri atas :

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM;
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah



ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan hal ini dikarenakan agar pemenuhan syarat ini dapat berjalan secara efektif.

## 9. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta membuka akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengorganisasian masyarakat yang dimulai dari mengidentifikasi masalah yang dihadapi di masyarakat, kemudian menyusun urutan prioritas masalah. Setelah prioritas masalah diperoleh, lalu masyarakat mengupayakan untuk mencari sumberdaya baik yang ada di masyarakat itu sendiri maupun di luar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Sumberdaya tersebut diharapkan dapat memanfaatkan untuk mengatasi masalah yang ada melalui tindakan-tindakan yang diperlukan dengan cara kerjasama dengan anggota masyarakat lainnya.

Jadi pada dasarnya pergerakan dan pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses kegiatan masyarakat yang bersifat setempat yang ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pengalaman belajar

dan secara bertahap dikembangkan pendekatan yang bersifat partisipatif dalam bentuk pendelegasian wewenang dan pemberian peran yang semakin besar kepada masyarakat.

Menurut (Sumodiningrat, 2007:107) pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah, ketiga, melindungi/memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan.

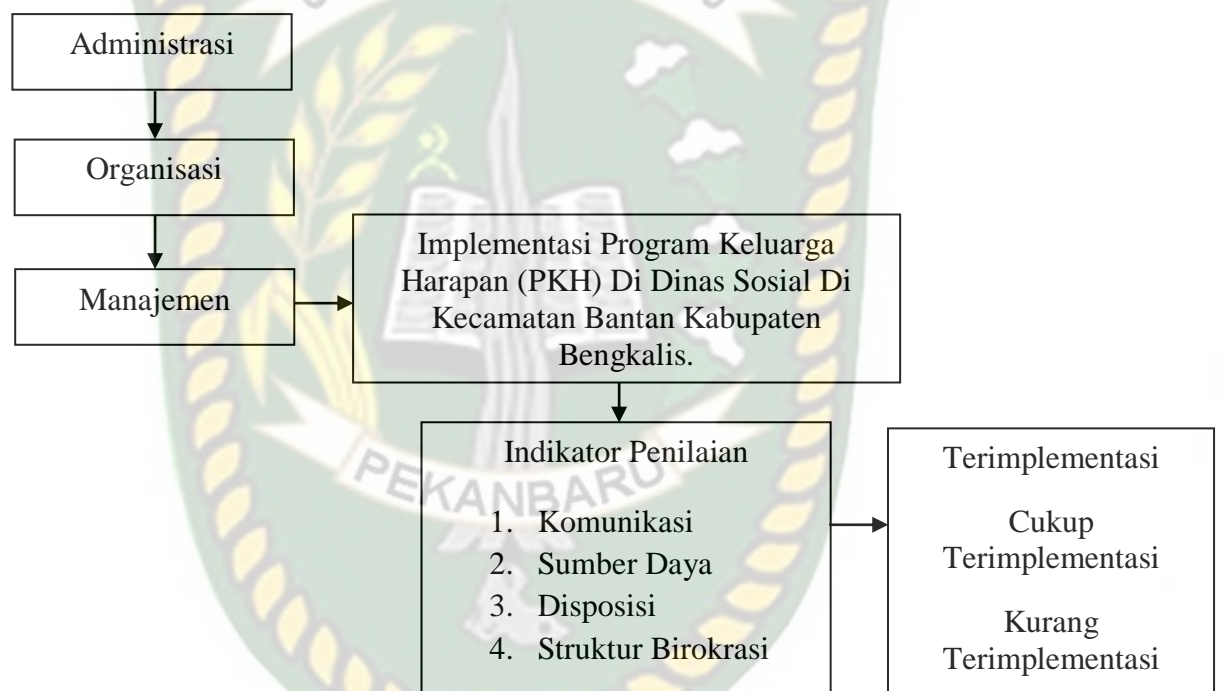
Menurut sumodinigrat (2004:41) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

## **B. Kerangka Pikir**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta dalam melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”.

Kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka peneliti menjelaskan hubungan unsur-unsur dalam peneliti ini ke dalam gambaran alur penelitian yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.**



Sumber : Hasil Modifikasi Penulis, 2020

### C. Hipotesis

Berdasarkan fenomena dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditemukan hipotesis sebagai berikut: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis belum teratasi dengan baik. Hal ini bisa dilihat Masih kurangnya petugas Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan yang memberikan

pelayanan secara langsung kepada penerima bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga tidak semua penerima bantuan dalam program keluarga harapan (PKH) memperoleh layanan yang baik.

#### **D. Konsep Operasional**

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai realita. Untuk menghindari salah penafsiran dalam penulisan ini maka perlu ditegaskan terlebih dahulu konsep yang akan dioperasionalkan diantaranya :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah untuk memfasilitasi proses kerja sama untuk pencapaian suatu tujuan tertentu.
3. Manajemen adalah suatu proses-proses yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan suatu organisasi.
4. Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Menurut Young dan Quin Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya (dalam Suharto, 2005:44).



5. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan suatu kebijakan atau undang-undang yang melibatkan berbagai faktor, program, organisasi, prosedur dalam upaya untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
6. Program (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota Keluarga RTSM diwajibkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana.
8. Komunikasi adalah kegiatan atau interaksi antara dua orang atau lebih dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Komunikasi yang dimaksud adalah kelancaran dan kejelasan atau informasi yang disampaikan kepada pelaksanaan kebijakan dalam hal ini adalah Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
9. Sumber daya adalah pelaksana atau implementor yang dikerahkan yang memiliki keahlian atau kemampuan yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan, baik dari segi fasilitas atau sarana prasarana maupun wewenang yang dapat menunjang implementasi kebijakan.
10. Disposisi adalah sikap birokrasi atau pelaksana yang berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik

tersebut seperti niat, kemauan, motivasi, dan psikologi untuk melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

11. Struktur Birokrasi adalah pelaksana dalam kebijakan tersebut, yang dimaksud dalam hal ini adalah struktur organisasi yang memiliki kesesuaian yang tepat untuk menjadi implementor dalam penyelenggara suatu kebijakan publik.

#### **E. Operasional Variabel**

Operasional variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, item penilaian, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep- konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokan item penelitian yang nama sebagai variabel penelitian adalah “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ” yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Table 2.1 Tabel Operasional Variabel Penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Yang Dinilai	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
<p>Implementasi kebijakan adalah satu aktivitas dari kegiatan administrasi sebagai suatu institusi di maksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administrative adalah unit birokratik Menurut George Edward III (dalam Agustino, 2016;136).</p>	<p>Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.</p>	1. Komunikasi	<p>a. Transmisi -komunikasi langsung -Terjalannya komunikasi yang baik -Penyaluran komunikasi atau penyuluhan sosialisasi</p> <p>b. Kejelasan -penyampaian informasi dan peraturan -mendapatkan informasi</p> <p>c. Konsisten -diterapkan Program Keluarga harapan -Hambatan Dinas Sosial -pelaksanaan Program Keluarga Harapan</p>	<p>Terimplementasi</p> <p>Cukup Terimplementasi</p> <p>Kurang Terimplementasi</p>
		2. Sumber Daya	<p>a. Staf/SDM -pelaksanaan tugas tentang Pogram Keluarga harapan -Prosedur Pelaksanaan -menjalankan Program Keluarga</p>	<p>Terimplementasi</p> <p>Cukup Terimplementasi</p> <p>Kurang Terimplementasi</p>

			<p>Harapan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sopan/ramah dalam melayani masyarakat</li> </ul> <p>b. Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Media Massa</li> <li>-sikap pemerintah terhadap masyarakat</li> <li>-pelaksanaan rapat</li> </ul> <p>c. Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-fasilitas yang diberikan pemerintah</li> <li>-sarana dan prasarana pendukung</li> </ul>	
		3. Disposisi	<p>a. Efek Disposisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sikap Dinas Sosial dalam menyelesaikan tugas PKH</li> <li>- perlakuan/tindakan yang tidak baik dari pegawai</li> <li>-pelaksanaan kebijakan PKH</li> <li>-aturan-aturan yang diterapkan</li> </ul> <p>b. Melakukan Pengaturan birokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-penilaian terhadap staf Dinas Sosial</li> <li>-pelayanan pemerintah kabupaten</li> <li>-kemampuan dan kapasitas para staf</li> </ul>	<p>Terimplementasi</p> <p>Cukup Terimplementasi</p> <p>Kurang Terimplementasi</p>



		4. Struktur Birokrasi	a. Membuat SOP -pelaksanaan SOP b. Melaksanakan Fragmentasi -Tanggung jawab dengan tugas yang diberikan -melaksanakan tugas berdasarkan struktur organisasi dan tupoksinya.	Terimplementasi  Cukup Terimplementasi  Kurang Terimplementasi
--	--	-----------------------	---	--

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2020

#### F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : terimplementasi, Cukup Terimplementasi dan Kurang Terimplementasi.

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Untuk lebih jelasnya tentang kategori ukuran tersebut akan diuraikan dibawah ini :

➤ **Ukuran Variabel**

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas

Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten  
Bengkalis berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplentasi : Apabila penilaian terhadap Implementasi  
Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas  
Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten  
Bengkalis berada pada skala 0-33%

➤ **Ukuran Indikator Variabel**

1. Komunikasi

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator  
Komunikasi berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator  
Komunikasi berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator  
Komunikasi berada pada skala 0-33%

2. Sumber Daya

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator  
Sumber Daya berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator  
Sumber Daya berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator  
Sumber Daya berada pada skala 0-33%

3. Disposisi

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator  
Disposisi berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator  
Disposisi berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator  
Disposisi berada pada skala 0-33%

#### 4. Struktur Birokrasi

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator  
Struktur Birokrasi berada pada skala 67-  
100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator  
Struktur Birokrasi berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator  
Struktur Birokrasi berada pada skala 0-33%

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kuantitatif, metode penelitian ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif.

Tipe Penelitian ini adalah tipe deskriptif, dengan metode kuantitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, serta dengan jenis pengumpulan data menggunakan teknik angket/kuisisioner. Metode Kuantitatif adalah sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2009:72).

untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini. Penulisan menggunakan metode angket. Prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian pada saat penulis mengumpulkan data lapangan.



## **B. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penulis mengambil lokasi penelitian pada Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Kemudian untuk fokus penelitiannya yaitu Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis adapun alasan memilih lokasi ini dikarenakan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis belum terlaksana dengan baik.

## **C. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (sugiyono, 2009:73). Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Bidang Jaminan Sosial keluarga.

### **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya maka peneliti dapat menggunakan sebagian sampel yang diambil dari populasi (sugiyono, 2009:73). Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 71 orang.

**Table III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.**

No	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Ketua Dinas Sosial	1	1	100%
2.	Bidang Jaminan Sosial Keluarga	1	1	100%
3.	penerima Bantuan PKH Di Desa Sukamaju	30	23	1%
4.	penerima Bantuan PKH Di Desa Jangkang	30	23	1%
5.	penerima Bantuan PKH Di Desa Pasiran	30	23	1%
	Jumlah	92	71	1%

*Sumber : Data Olahan Penulis, 2020*

Jumlah masyarakat penerima Bantuan PKH di Desa Sukamaju berkisar 30 orang, di Desa jangkang 30 orang dan di Desa pasiran 30 orang.

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *Insidental Sampling*, dimana menurut Sugiyono (2009:96) *Insidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data dan sampel ditentukan minimal 30 orang berdasarkan teori *Insidental Sampling* menurut sugiyono (2009:96) bahwa untuk peneliti kuantitatif, sampel minimal 30 orang.

Teknik penarikan *Insidental Sampling* ini ditunjukkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Jadi peneliti menggunakan teknik kuisioner terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengumpulkan data. Selanjutnya untuk Kepala Dinas Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin, peneliti menggunakan teknik sensus dalam menentukan sampel, yakni seluruh populasi dijadikan sampel, kemudian menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

##### **a. Data primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan peneliti yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan yang penelitian turun langsung kelapangan/lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu langsung mewawancarai Ketua Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kepala Dinas Sosial. Sehingga memperoleh data, informasi serta keterangan mengenai penelitian ini.

##### **b. Data sekunder**

Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan yang relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan peneliti ini yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bantan kabupaten bengkalis. Data sekunder ini diperoleh dari Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bantan kabupaten bengkalis, baik dari dokumen resmi yang diberikan oleh Petugas PKH Kabupaten Bengkalis seperti arsip literature berupa struktur organisasi, maupun informasi atau keterangan yang telah dipublikasikan/ditempelkan di papan/dinding informasi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data disimpulkan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini peneliti langsung mengamati Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

2. Wawancara (Interview)



Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih absah, jelas dan akurat serta aktual. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau responden yang dianggap banyak atau tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

### 3. Kuisisioner / Angket

Kuisisioner yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebar daftar pertanyaan untuk diisi oleh sejumlah responden (Narimawati, 2007:64) pengumpulan data untuk penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan angket atau kuisisioner.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

## **G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis**

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif secara deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berdasarkan kondisi yang ada dilapangan penelitian. Selanjutnya data yang didapatkan, dikumpulkan dan diklarifikasi melalui kuesioner menurut jenisnya

kemudian diolah kedalam tabel, setelah itu diuraikan dan kemudian diberikan pembahasan sekaligus pengujian hipotesis.

#### H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan penelitian tentang Implementasi program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :**

NO	JenisKegiatan	Bulan dan Minggu Ke																					
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Septem ber	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Penyusunan UP	■																					
2	Seminar UP					■																	
3	Revisi UP						■																
4	Revisi Kuesioner							■															
5	Rekomendasi Survey									■													
6	Survey Lapangan										■												
7	Analisis Data											■											
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian													■									
9	Konsultasi Revisi Skripsi														■								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																■						
11	Revisi Skripsi																		■				
12	Penggandaan Skripsi																				■		

*Sumber : Data Olahan Penulis, 2020*

## **I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian**

Sistematika pembahasan dalam penelitian tesis bertujuan untuk memberikan suatu gambaran secara utuh, menyeluruh dan sistematis yang ditulis oleh peneliti, sehingga akan mudah dibaca dan dipahami dari hasil penelitian ini. Usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya agar mudah dibaca dan dipahami tesis ini akan disusun sistematis sebagai berikut :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

### **BAB 11 : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikir, konsep operasional dan konsep variabel penelitian.

### **BAB 111 : METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta Sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB 1V : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

BAB ini membahas mengenai penelitian kuantitatif tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membagikan ke dalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Riau, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan ibu kotanya Bengkalis di pimpin oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II. Kabupaten Bengkalis dengan beribu kota Bengkalis dan Kabupaten ini berada di pulau Bengkalis yang terpisah dari pulau Sumatra. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai siak. Kota terbesar di Kabupaten ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau.

Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, dikarenakan dilalui oleh jalur kapal-kapal besar internasional paling sibuk di dunia. Yakni selat Malaka serta berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMS-GT). Wilayahnya mencakup pada bagian timur Pulau Sumatera antara 2°30 Lintang Utara (L,U), -0°17 Lintang Utara (LU) atau 100°52 Bujur Timur (BT), -102°52 Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur (BT) dan dengan luasnya 7.793,93 km<sup>2</sup> meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 446 km<sup>2</sup> yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Siak  
 Sebelah Barat : Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu.

**Gambar IV.1 : Peta Wilayah Kabupaten Bengkalis**



Wilayah Kabupaten Bengkalis sebagian besar merupakan tanah organosol. Yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Dataran rendahnya dengan rata-rata ketinggian 2-6, 1 meter diatas permukaan laut. Tercatat sebanyak 17 Pulau Besar dan beberapa pulau kecil termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Wilayah kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah sungai siak dengan panjang 300 Km, Sungai Siak Kecil 90 km dan Sungai Mandau 87 Km. Kabupaten Bengkalis mempunyai Iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan

temperatur 26°C - 32°C, dengan kelembapan 85%. Musim hujan berlangsung antara bulan September hingga Januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 900-1.500 MM/Tahun. Sedangkan musim kemarau berlangsung pada bulan Februari hingga Agustus. Selain itu juga, kabupaten Bengkalis juga mengenal empat musim yakni angin utara, timur, barat, dan selatan.

Secara Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Bengkalis memiliki 8 Kecamatan dan 102 Kelurahan/Desa pada tahun 2013. Dan pada tahun 2014, telah aktif 53 desa baru hasil pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08-15 tahun 2012 sehingga jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis menjadi 155 desa/kelurahan.

**Tabel IV.I : Luas Wilayah dan jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Mandau	937,47	293.513
2	Pinggir	2.503,00	8.6535
3	Bukit Batu	1.128,00	32.840
4	Siak Kecil	742,21	20.220
5	Rupat	896,35	33.063
6	Rupat Utara	628,50	14.201
7	Bengkalis	514,00	78.571
8	Bantan	424,40	39.044
	Jumlah	7.773,93	543.987

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis, 2017*



Penduduk Kabupaten Bengkalis sangat Heterogen dengan mayoritas beragama islam. Selain suku melayu yang merupakan suku khas, penduduk Kabupaten Bengkalis berasal dari berbagai suku bangsa aceh, Banjar, Batak, Bugis, Jawa, Minang, Sunda, dan Tiong Hoa. Dan Bengkalis sebagai Ibukota Kabupaten dikenal juga dengan Kota Terubuk, karena daerah ini adalah penghasil telur ikan terubuk yang sangat disukai masyarakatnya dengan rasa yang sangat lezat dan tentu saja menyebabkan harga telur ikan terubuk ini menjadi amat mahal. Berkembangnya Kabupaten ini juga didukung adanya pertambangan minyak di Kecamatan Mandau Duri, dari pertambangan minya ini menghasilkan minyak dan gas yang menjadi sumber terbesar APBD Kabupaten Bengkalis.

#### **B. Profil Singkat Kecamatan Bantan**

Kecamatan Bantan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, tepatnya berada di pulau Bengkalis, dengan luas wilayah 424,40 Km<sup>2</sup>. Secara geografis terletak pada posisi 102 0.00 Lintang Utara. Bentuk wilayah Kecamatan Bantan berbentuk datar sampai berombak.

Kecamatan Bantan mempunyai 23 Desa dan mempunyai jumlah penduduk 6.550 jiwa atau 1.732 KK dengan luas daerah 7073 H, yang terdiri dari 8 Dusun. Daerah ini terletak pada ketinggian 2-5 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu udara berkisar 26 0 C–300 C. Keadaan curah hujan setiap tahun dengan rata-rata 189.1 M2/Tahun. Berdasarkan data dari Kantor Camat Bantan, luas wilayah kecamatan Bantan adalah 424 Km<sup>2</sup>, dimana desa terluas adalah Teluk Pambang dengan luas 114 Km<sup>2</sup> atau 26,89% dari luas keseluruhan Kecamatan Bantan, diikuti oleh desa Selat Baru 63 Km<sup>2</sup> (14,86%) dan Bantan



Tengah 51 Km<sup>2</sup> (12,03%). Desa dengan jarak lurus terjauh dari ibu kota Kecamatan Bantan adalah desa Teluk Lancar dengan jarak lurus 37 Km<sup>2</sup>. Dan jarak terdekat adalah desa Selat Baru sebagai Ibukota Kecamatan Bantan. Batas wilayah Kecamatan Bantan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Selat Melaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : kecamatan Bengkalis.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Bantan Tengah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Muntai.

### **C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis**

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (SekDa). Dinas Sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis memiliki Visi dan Misi, yakni :

Visi :

- Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Misi :

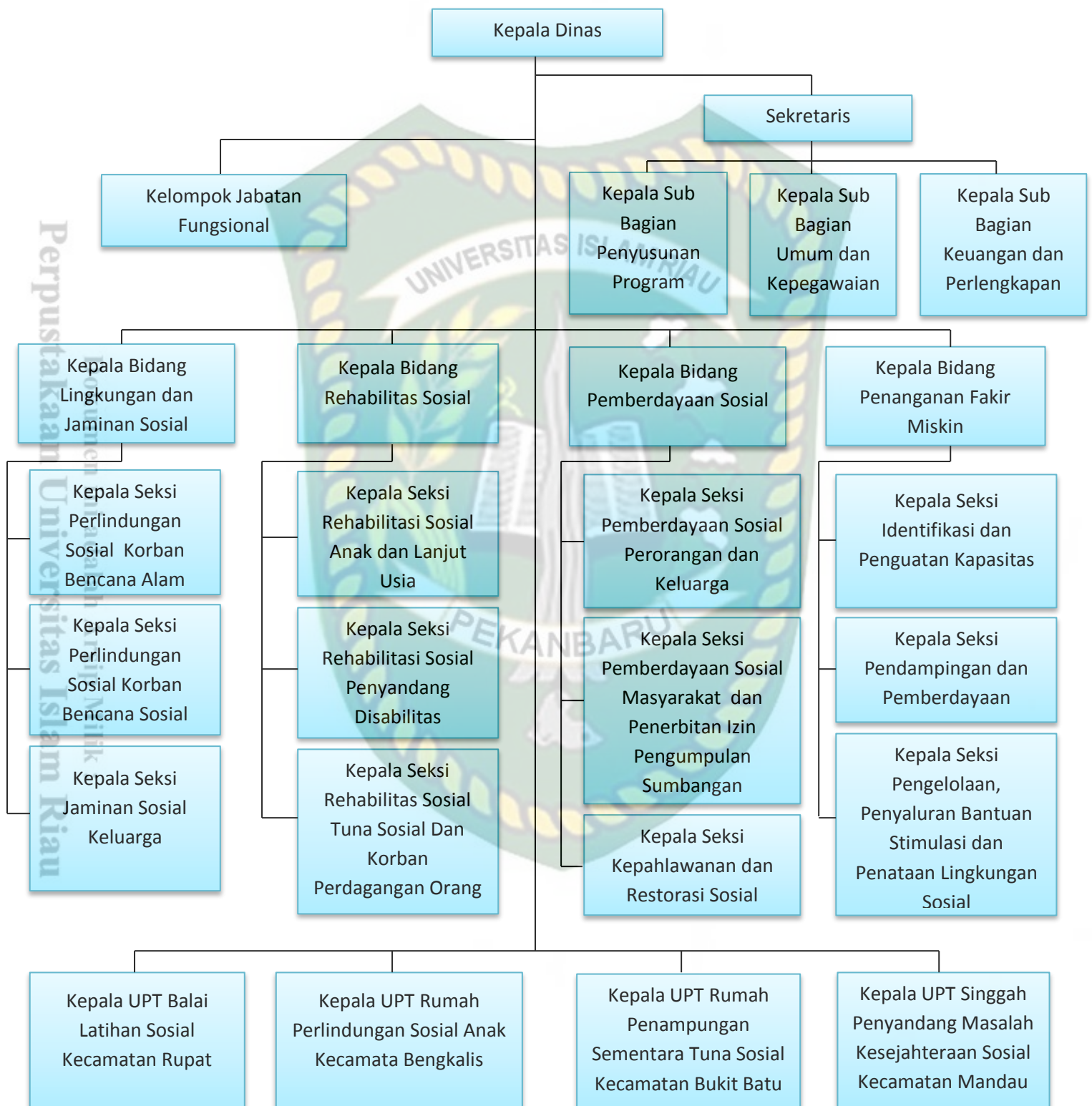
- Mewujudkan Perlindungan, Jaminan, Rehabilitas, dan Pelayanan Sosial bagi PMKS.
- Meningkatkan Mutu Pelayanan Sosial melalui kelembagaan Sosial.
- Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintahan yang Baik.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ditetapkan beberapa tujuan, yakni :

1. Meningkatkan sistem pelayanan sosial.
2. Meningkatkan kualitas hidup anak panti dan meningkatkan peran serta kelembagaan sosial lainnya.
3. Mensejahterakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (fakir miskin, KAT) dan PMKS lainnya.
4. Mensejahterakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (penyandang cacat dan penyakit sosial) dan PMKS lainnya.

Berikut adalah Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 42 tahun 2016 tanggal 30 November 2016 :

**Gambar IV.2 : Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis**



*Sumber : kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.*

#### **D. Fungsi dan Tujuan Organisasi**

Dinas Sosial merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial ;
- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial ;
- c. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial ;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **E. Sumber Daya Organisasi**

Sumber daya di dalam organisasi adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang segala proses menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia sendiri yakni orang-orang yang menjabat



(ASN) melaksanakan tugas dan fungsinya yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Adapun jumlah ASN berdasarkan jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri dari :

**Tabel IV. 2 jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2017**

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas
2	Pejabat Administrator	5	Sekretaris dan Kepala Bidang
3	Pejabat Pengawasan	19	Kasi, Kasubbag dan Kepala UPTD
4	Pegawai ASN Golongan IV	1	Staf
5	Pegawai ASN Golongan III	6	Staf
6	pegawai ASN Golongan II	29	Staf
7	Pegawai Honorer	79	Tenaga Administrasi, Kebersihan, supir dan Keamanan
	Jumlah	140	

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.*

Setiap jabatan tersebut, mereka memiliki uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
3. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Bengkalis.

b. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Tugas Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas dan fungsinya adalah :

1. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial.
  2. Perlindungan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam.
  3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial.
  4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga.
  5. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perlindungan dan jaminan sosial.
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugas dan fungsinya adalah :

1. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak diluar panti dan lembaga, untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari provinsi.

3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial disabilitas diluar panti dan lembaga, untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang provinsi.
4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang provinsi.
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang provinsi.
6. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi.
7. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untu dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi.
8. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial diluar panti lembaga.



9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial

Tugas dan Fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.
4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evakuasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, pembinaan mualaf, restorasi sosial dan pemakaman.
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evakuasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
6. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan sosial.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun non tertulis.

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Tugas dan Fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan, teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perdesaan.
3. Pelaksanaan kebijakan, teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miski perkotaan.
4. Pelaksanaan kebijakan, teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara.
5. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten.
6. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penanganan fakir miskin.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif tipe deskriptif dengan cara pencarian informasinya melalui survey turun lapangan menyebarkan kuesioner yang telah dirancang oleh peneliti yang sebelumnya telah dilakukan pengujian validitas reliabilitas agar kuesioner yang di distribusikan dapat memberikan gambaran, agar data tidak memiliki kendala normalitas dan syarat-syarat untuk melakukan pengujian hipotesis lainnya.

Identitas responden berguna untuk mengetahui seberapa banyak responden yang berdasarkan tingkat jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi responden yang terdapat dalam penelitian ini sehingga lebih memperjelas hasil penelitiannya. Secara rincinya identitas responden penelitian akan disajikan pada tabel dibawah ini :

##### 1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi suatu pekerjaan, laki-laki biasanya akan bekerja lebih cepat dari pada perempuan, tetapi perempuan akan bekerja lebih rapi dalam hasil pekerjaannya. Masing-masing memilih kelebihan dan kekurangan, oleh sebab itu diharapkan keduanya mampu bekerja sama dengan baik. Jenis kelamin juga mempengaruhi tingkat emosional, dimana laki-laki akan lebih cepat terpancing emosi dari pada perempuan dan ini akan berpengaruh pada hasil pekerjaan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.1 Responden Berdasarkan Tingkat Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	18	20%
2	Perempuan	72	80%
	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020.*

Berdasarkan tabel V.1, terlihat bahwa responden yang terdiri dari penerima bantuan program keluarga harapan dari 90 responden, yang menjadi responden laki-laki sebanyak 18 dengan jumlah persentasenya 20%, sedangkan responden perempuan sebanyak 72 atau dengan jumlah persentasenya 80%. Jadi yang paling dominan menjadi responden pada penelitian ini adalah perempuan, sebagaimana yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas dan KASI Jaminan Sosial Keluarga “dikarenakan responden dari peserta PKH yang mengelola penerimaan dananya adalah Ibu atau wanita yang mengurus keluarga tersebut”

## 2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Umur merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Berikut tingkat umur yang peneliti jadikan responden :

**Tabel V.2 Responden Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Jumlah Responden	Persentase
1	41 – 50 Tahun	27	30%
2	>50 Tahun	63	70%
	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020*



Berdasarkan tabel V.2 dalam hal ini peneliti mendapatkan data mengenai umur keseluruhan responden yang dibagi 2 kelompok. Diantaranya umur 41-50 tahun terdapat 27 orang (30%), dan umur >50 tahun ke atas terdapat 63 orang (70%). Jadi dapat disimpulkan bahwa yang paling dominan menjadi responden peneliti berada pada umur >50 tahun ke atas.

### 3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan didunia ini. Seseorang yang pendidikan akan berfikir secara luas dan rasional, dapat membedakan mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak. Orang yang berpendidikan juga bisa lebih mencerna perkataan yang subyektif dan formal, berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan mereka terlihat sulit untuk mengartikan setiap bahasa-bahasa yang kita berikan dikarenakan terbiasa menggunakan bahasa daerah.

Untuk mengetahui, berikut jumlah responden dengan tingkat pendidikannya :

**Tabel V.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	61	67%
2	SLTP	28	31%
3	SLTA	1	2%
	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020*

Berdasarkan tabel V.3 diketahui bahwa responden berdasarkan tingkat pendidikan didominasi dari tamatan Sekolah Dasar (SD) yakni berjumlah 61 orang dengan persentase (67%) dan tingkat pendidikan SLTA berjumlah 1 orang (2%) jumlah terendah. Maka dapat disimpulkan bahwa responden yang paling dominan oleh tingkat pendidikan SD dengan persentase (67%).

## **B. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

Implementasi atau pelaksanaan dalam sebuah kebijakan atau program yang dibuat sangatlah penting, karena percuma jika ada sebuah kebijakan tanpa adanya implementasi atau pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Proses implementasi kebijakan atau program ini dapat dikatakan paling penting dalam perumusan tujuan sebuah organisasi. Dalam rangka untuk mendapatkan keberhasilan implementasi kebijakan hendaknya menggunakan beberapa tolak ukur yang menjadi acuan berlangsungnya implementasi kebijakan.

Oleh karna itu, maka dalam bagian ini akan menjelaskan analisis tanggapan responden yang berasal dari Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Bantuan Sosial, dan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari empat indikator yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Yang mana bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan sebuah pelaksanaan kebijakan. Komunikasi pelaksanaan suatu kebijakan berupa sosialisasi, penyebaran informasi, tata cara ketentuan dalam suatu kebijakan tersebut. Semakin baik komunikasi yang kita bangun dalam sebuah pelaksanaan kebijakan maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi begitupun sebaliknya.

Berikut tanggapan dari 30 responden yang terdiri dari peserta PKH berdasarkan hasil kuisioner, sebagai berikut:

**Tabel V.4 Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai Indikator Komunikasi terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.**

**Desa Sukamaju**

No	Item Pertanyaan	Kategori penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>A.</b>	<b>Transmisi</b>				
1.	Komunikasi langsung dengan pemerintah kabupaten dalam mendapatkan informasi tentang program keluarga harapan	26 (86%)	4 (13%)	0 (0%)	30
2.	Pemerintah kabupaten dengan masyarakat yang menerima bantuan PKH	18 (6%)	12 (4%)	0 (0%)	30
3.	Penyaluran komunikasi dari pihak pemerintah kabupaten kepada masyarakat penerima bantuan PKH	30 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	30
4.	Pemerintah kabupaten yang melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan PKH	30 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	30
	Jumlah	104	16	0	120
	Rata-rata	26	4	0	30
	Persentase	86%	13%	0%	100%

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020*

Dari Tabel V.4 dijelaskan hasil penilaian pada indikator Komunikasi bagian A. Transmisi terdapat 4 item penilaian, yang pertama Komunikasi langsung dengan pemerintah kabupaten dalam mendapatkan informasi tentang program keluarga harapan jawaban responden berjumlah 26 orang (86%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 4 orang (13%) dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi Tidak ada 0 (0%). Berarti sebagian besar responden penerima bantuan PKH bahwa Dinas Sosial telah Berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya untuk item penilaian kedua Pemerintah kabupaten dengan masyarakat yang menerima bantuan PKH jawaban responden berjumlah 18 orang (6%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 12 orang (4%) dan yang berapa pada kategori Kurang Terimplementasi Tidak ada 0 (0%). Selanjutnya untuk item penilaian ketiga Penyaluran komunikasi dari pihak pemerintah kabupaten kepada masyarakat penerima bantuan PKH jawaban responden berjumlah 30 orang (1%) terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi dan Kurang Terimplementasi Tidak ada 0 (0%). Selanjutnya untuk item penilaian ke empat Pemerintah kabupaten yang melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan PKH jawaban responden berjumlah 30 orang (1%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi dan Kurang Terimplementasi Tidak ada 0 (0%).



Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Komunikasi yaitu sebesar 86%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>B.</b>	<b>Kejelasan</b>				
1.	Menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat tentang PKH	29 (96%)	1 (3%)	0 (0%)	30
2.	Pemerintah kabupaten cukup jelas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH	4 (13%)	26 (86%)	0 (0%)	30
3.	Pihak pemerintah kabupaten yang membuat sebuah informasi dan peraturan kepada pihak pendamping untuk dilanjutkan kepada peserta PKH	27 (9%)	1 (3%)	2 (3%)	30
4.	Memperoleh informasi dari pemerintah kabupaten mengenai adanya PKH	29 (96%)	1 (3%)	0 (0%)	30
	Jumlah	89	29	2	120
	Rata-rata	22	7	5	34
	Persentase	73%	23%	16%	100%

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020*

Dari Tabel V.4 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Komunikasi bagian B. Kejelasan terdapat 4 item penilaian, yang pertama Menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat tentang PKH jawaban responden berjumlah 29 orang (96%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%) dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi Tidak ada 0 (0%). Selanjutnya untuk item penilaian kedua Pemerintah kabupaten cukup jelas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH berjumlah 4 orang (13%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 26 orang (86%) dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi Tidak ada 0 (0%). Selanjutnya untuk item penilaian ke tiga Pihak pemerintah kabupaten yang membuat sebuah informasi dan peraturan kepada pihak pendamping untuk dilanjutkan kepada peserta PKH jawaban responden berjumlah 27 orang (9%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%) dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 2 orang (3%). Selanjutnya untuk item penilaian ke empat Memperoleh informasi dari pemerintah kabupaten mengenai adanya PKH jawaban responden berjumlah 29 orang (96%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%) dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi Tidak ada 0 (0%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Komunikasi yaitu sebesar 73%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>C.</b>	<b>Konsisten</b>				
1.	Program Keluarga Harapan sudah dijalankan oleh Dinas Sosial	30 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	30
2.	Pemerintah kabupaten sudah menerapkan atau melakukan PKH dengan baik	29 (96%)	1 (3%)	0 (0%)	30
3.	Hambatan bagi pelaksana yang turun kelapangan dalam melaksanakan PKH	1 (3%)	24 (8%)	5 (16%)	30
4.	Tanggapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	30 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	30
	Jumlah	90	25	5	120
	Rata-rata	22	6	1	29
	Persentase	73%	2%	3%	100%

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020*

Dari Tabel V.4 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Komunikasi bagian C. Konsisten terdapat 4 item penilaian, yang pertama Program Keluarga Harapan sudah dijalankan oleh Dinas Sosial jawaban responden berjumlah 30 orang (1%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi dan Kurang Terimplementasi Tidak ada. Selanjutnya untuk item penilaian ke Dua Pemerintah kabupaten sudah menerapkan atau melakukan PKH dengan baik jawaban responden berjumlah 29 orang (96%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0 (0%). Selanjutnya untuk item penilaian ke Tiga Hambatan bagi pelaksana yang turun kelapangan dalam melaksanakan PKH jawaban responden berjumlah 1 orang (3%) yang Terimplmentasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 24 orang (8%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 5 orang (16%). Selanjutnya untuk item penilaian ke Empat Tanggapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan jawaban responden berjumlah 30 orang (1%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi dan Kurang Terimplementasi Tidak ada 0 (0%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Komunikasi yaitu sebesar 73%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Ibuk Dra. Hj. Martini, MH mengenai indikator Komunikasi dengan pertanyaan pertama Apakah Dinas Sosial sudah menjalankan Program Keluarga Harapan? Beliau Menjawab:

*Sudah, mulai dari tahun 2014 sudah berjalan program keluarga harapan di kabupaten bengkalis. Perjuangannya sangat banyak sekali sebelum tahun*



2014, 2013 sudah dilakukan sosialisasi walaupun program-program PKH belum dijalankan dan program keluarga harapan berjalan mulai bulan agustus tahun 2014.(Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis, Bapak Dedi Irawan, S.sos mengenai indikator komunikasi dengan pertama Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai komunikasi yang terjadi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan? Beliau Menjawab:

*Sebelum-sebelumnya sangat bagus sekali, antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Pemerintah Pusat. Antara surat menyurat atau Bab-bab suratnya terjalin dengan baik. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB).*

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Komunikasi secara keseluruhan sudah menjalankan tugas nya dengan baik. Sehingga peneliti menyimpulkan mengenai indikator Komunikasi “Terimplementasi”.

## Desa Pasiran

No	Item Pertanyaan	Kategori penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>A.</b>	<b>Transmisi</b>				
1.	Komunikasi langsung dengan pemerintah kabupaten dalam mendapatkan informasi tentang program keluarga harapan	20 (66%)	10 (33%)	0 (0%)	30
2.	Pemerintah kabupaten dengan masyarakat yang menerima bantuan PKH	17 (56%)	13 (43%)	0 (0%)	30
3.	Penyaluran komunikasi dari pihak pemerintah kabupaten kepada masyarakat penerima bantuan PKH	24 (8%)	0 (0%)	6 (2%)	30
4.	Pemerintah kabupaten yang melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan PKH	25 (83%)	1 (3%)	4 (13%)	30
	Jumlah	86	24	10	120
	Rata-rata	21	6	5	32
	Persentase	25%	2%	16%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Dari Tabel V.4 diatas dapat diketahui bahwa pada indikator Komunikasi bagian A. Transmisi terdapat 4 item penilaian, yang pertama Komunikasi langsung dengan pemerintah kabupaten dalam mendapatkan informasi tentang program keluarga harapan jawaban responden berjumlah 20 orang (66%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 10 (33%) orang dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi Tidak ada 0 (0%). Berarti sebagian besar responden penerima bantuan PKH bahwa Dinas Sosial telah Berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya untuk item penilaian kedua Pemerintah kabupaten dengan masyarakat yang menerima bantuan PKH jawaban responden berjumlah 17 orang (56%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 13 orang (43%) dan yang berapa pada kategori Kurang Terimplementasi Tidak ada. Selanjutnya untuk item penilaian ketiga Penyaluran komunikasi dari pihak pemerintah kabupaten kepada masyarakat penerima bantuan PKH jawaban responden berjumlah 24 orang (8%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi Tidak ada 0 (0%) dan Kurang Terimplementasi berjumlah 6 orang (2%). Selanjutnya untuk item penilaian ke empat Pemerintah kabupaten yang melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan PKH jawaban responden berjumlah 25 orang (83%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%) dan Kurang Terimplementasi berjumlah 4 orang (13%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Komunikasi yaitu sebesar 25%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	Jumlah
<b>B.</b>	<b>Kejelasan</b>				
1.	Menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat tentang PKH	29 (96%)	0 (0%)	1 (3%)	30
2.	Pemerintah kabupaten cukup jelas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH	22 (73%)	8 (26%)	0 (0%)	30
3.	Pihak pemerintah kabupaten yang membuat sebuah informasi dan peraturan kepada pihak pendamping untuk dilanjutkan kepada peserta PKH	25 (83%)	1 (3%)	4 (13%)	30
4.	Memperoleh informasi dari pemerintah kabupaten mengenai adanya PKH	20 (66%)	10 (33%)	0 (0%)	30
	Jumlah	96	19	5	120
	Rata-rata	24	4	25	53
	Persentase	8%	13%	83%	100%

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020*



Dari Tabel V.4 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Komunikasi bagian B. Kejelasan terdapat 4 item penilaian, yang pertama Menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat tentang PKH jawaban responden berjumlah 29 orang (96%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi Tidak ada 0 (0%) dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%). Selanjutnya untuk item penilaian kedua Pemerintah kabupaten cukup jelas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH berjumlah 22 orang (73%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 8 orang (26%) dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi Tidak ada 0 (0%). Selanjutnya untuk item penilaian ke tiga Pihak pemerintah kabupaten yang membuat sebuah informasi dan peraturan kepada pihak pendamping untuk dilanjutkan kepada peserta PKH jawaban responden berjumlah 25 orang (83%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%) dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 4 orang (13%). Selanjutnya untuk item penilaian ke empat Memperoleh informasi dari pemerintah kabupaten mengenai adanya PKH jawaban responden berjumlah 20 orang (66%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 10 orang (33%) dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi Tidak ada 0 (0%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Komunikasi yaitu sebesar 83%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “ Kurang Terimplementasi”.

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>C.</b>	<b>Konsisten</b>				
1.	Program Keluarga Harapan sudah dijalankan oleh Dinas Sosial	27 (9%)	0 (0%)	3 (1%)	30
2.	Pemerintah kabupaten sudah menerapkan atau melakukan PKH dengan baik	25 (83%)	0 (0%)	5 (16%)	30
3.	Hambatan bagi pelaksana yang turun kelapangan dalam melaksanakan PKH	1 (3%)	20 (66%)	9 (3%)	30
4.	Tanggapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	28 (93%)	0 (0%)	2 (6%)	30
	Jumlah	81	20	19	120
	Rata-rata	20	5	4	29
	Persentase	66%	16%	13%	100%

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020*

Dari Tabel V.4 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Komunikasi bagian C. Konsisten terdapat 4 item penilaian, yang pertama Program Keluarga Harapan sudah dijalankan oleh Dinas Sosial jawaban responden berjumlah 27 orang (9%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi Tidak ada 0 (0%) dan Kurang Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%). Selanjutnya untuk item penilaian ke Dua Pemerintah kabupaten sudah menerapkan atau melakukan PKH dengan baik jawaban responden berjumlah 25 (83%) orang yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi Tidak ada dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 5 orang (16%) . Selanjutnya untuk item penilaian ke Tiga Hambatan bagi pelaksana yang turun kelapangan dalam melaksanakan PKH jawaban responden berjumlah 1 orang (3%) yang Terimplmentasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 20 orang (66%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 9 orang (3%). Selanjutnya untuk item penilaian ke Empat Tanggapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan jawaban responden berjumlah 28 orang (93%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah Tidak ada dan Kurang Terimplementasi berjumlah 2 orang (6%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Komunikasi yaitu sebesar 66%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Ibuk Dra. Hj. Martini, MH mengenai indikator Komunikasi dengan pertanyaan pertama Apakah Dinas Sosial sudah menjalankan Program Keluarga Harapan? Beliau Menjawab:

*Sudah, mulai dari tahun 2014 sudah berjalan program keluarga harapan di kabupaten bengkalis. Perjuangannya sangat banyak sekali sebelum tahun*

2014, 2013 sudah dilakukan sosialisasi walaupun program-program PKH belum dijalankan dan program keluarga harapan berjalan mulai bulan agustus tahun 2014.(Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis, Bapak Dedi Irawan, S.sos mengenai indikator komunikasi dengan pertama Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai komunikasi yang terjadi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan? Beliau Menjawab:

*Sebelum-sebelumnya sangat bagus sekali, antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Pemerintah Pusat. Antara surat menyurat atau Bab-bab suratnya terjalin dengan baik. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB).*

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Komunikasi secara keseluruhan sudah menjalankan tugas nya dengan baik. Sehingga peneliti menyimpulkan mengenai indikator Komunikasi “Terimplementasi”.



### Desa Jangkang

No	Item Pertanyaan	Kategori penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>A.</b>	<b>Transmisi</b>				
1.	Komunikasi langsung dengan pemerintah kabupaten dalam mendapatkan informasi tentang program keluarga harapan	26 (86%)	3 (1%)	1 (3%)	30
2.	Pemerintah kabupaten dengan masyarakat yang menerima bantuan PKH	8 (26%)	22 (73%)	0 (0%)	30
3.	Penyaluran komunikasi dari pihak pemerintah kabupaten kepada masyarakat penerima bantuan PKH	17 (56%)	3 (1%)	10 (33%)	30
4.	Pemerintah kabupaten yang melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan PKH	17 (56%)	4 (13%)	9 (3%)	30
	Jumlah	68	32	20	120
	Rata-rata	17	8	5	30
	Persentase	56%	26%	16%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Dari Tabel V.4 diatas dapat diketahui bahwa pada indikator Komunikasi bagian A. Transmisi terdapat 4 item penilaian, yang pertama Komunikasi langsung dengan pemerintah kabupaten dalam mendapatkan informasi tentang program keluarga harapan jawaban responden berjumlah 26 orang (86%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%) dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%). Berarti sebagian besar responden penerima bantuan PKH bahwa Dinas Sosial telah Berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya untuk item penilaian kedua Pemerintah kabupaten dengan masyarakat yang menerima bantuan PKH jawaban responden berjumlah 8 orang (26%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 22 orang (73%) dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya untuk item penilaian ketiga Penyaluran komunikasi dari pihak pemerintah kabupaten kepada masyarakat penerima bantuan PKH jawaban responden berjumlah 17 orang (56%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%) dan Kurang Terimplementasi berjumlah 10 orang (33%). Selanjutnya untuk item penilaian ke empat Pemerintah kabupaten yang melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan PKH jawaban responden berjumlah 17 orang (56%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 4 orang (13%) dan Kurang Terimplementasi berjumlah 9 orang (3%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Komunikasi yaitu sebesar 56%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	Jumlah
<b>B.</b>	<b>Kejelasan</b>				
1.	Menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat tentang PKH	24 (8%)	0 (0%)	6 (2%)	30
2.	Pemerintah kabupaten cukup jelas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH	2 (6%)	25 (83%)	3 (1%)	30
3.	Pihak pemerintah kabupaten yang membuat sebuah informasi dan peraturan kepada pihak pendamping untuk dilanjutkan kepada peserta PKH	15 (5%)	2 (6%)	13 (43%)	30
4.	Memperoleh informasi dari pemerintah kabupaten mengenai adanya PKH	14 (46%)	14 (46%)	2 (6%)	30
	Jumlah	55	41	24	120
	Rata-rata	13	10	6	53
	Persentase	43%	33%	2%	100%

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020*

Dari Tabel V.4 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Komunikasi bagian B. Kejelasan terdapat 4 item penilaian, yang pertama Menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat tentang PKH jawaban responden berjumlah 24 orang (8%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup

Terimplementasi Tidak ada 0(0%) dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 6 orang (2%). Selanjutnya untuk item penilaian kedua Pemerintah kabupaten cukup jelas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH berjumlah 2 orang (6%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 25 orang (83%) dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%). Selanjutnya untuk item penilaian ke tiga Pihak pemerintah kabupaten yang membuat sebuah informasi dan peraturan kepada pihak pendamping untuk dilanjutkan kepada peserta PKH jawaban responden berjumlah 15 orang (5%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 2 orang (6%) dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 13 orang (43%). Selanjutnya untuk item penilaian ke empat Memperoleh informasi dari pemerintah kabupaten mengenai adanya PKH jawaban responden berjumlah 14 orang (46%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 14 (46%) orang dan yang berada pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 2 orang (6%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Komunikasi yaitu sebesar 43%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.



No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>C.</b>	<b>Konsisten</b>				
1.	Program Keluarga Harapan sudah dijalankan oleh Dinas Sosial	26 (86%)	1 (3%)	3 (1%)	30
2.	Pemerintah kabupaten sudah menerapkan atau melakukan PKH dengan baik	20 (66%)	5 (16%)	5 (16%)	30
3.	Hambatan bagi pelaksana yang turun lapangan dalam melaksanakan PKH	0 (0%)	18 (6%)	12 (4%)	30
4.	Tanggapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	17 (56%)	3 (1%)	10 (33%)	30
	Jumlah	63	27	30	120
	Rata-rata	15	6	7	28
	Persentase	5%	2%	23%	100%

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020*

Dari Tabel V.4 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Komunikasi bagian C. Konsisten terdapat 4 item penilaian, yang pertama Program Keluarga Harapan sudah dijalankan oleh Dinas Sosial jawaban responden berjumlah 26 orang (86%) Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%) dan Kurang Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%). Selanjutnya untuk item penilaian ke Dua Pemerintah kabupaten sudah menerapkan atau melakukan PKH dengan baik jawaban responden

berjumlah 20 orang (66%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 5 orang (16%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 5 orang (16%). Selanjutnya untuk item penilaian ke Tiga Hambatan bagi pelaksana yang turun kelapangan dalam melaksanakan PKH jawaban responden Terimplmentasi Tidak ada 0(0%). Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 18 orang (6%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 12 orang (4%). Selanjutnya untuk item penilaian ke Empat Tanggapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan jawaban responden berjumlah 17 orang (56%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%) dan Kurang Terimplementasi berjumlah 10 orang (33%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Komunikasi yaitu sebesar 23%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “ Kurang Terimplementasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Ibuk Dra. Hj. Martini, MH mengenai indikator Komunikasi dengan pertanyaan pertama Apakah Dinas Sosial sudah menjalankan Program Keluarga Harapan? Beliau Menjawab:

*Belum, mulai dari tahun 2014 masih berjuang sebelum tahun 2014, 2013 belum dilakukan sosialisasi program-program PKH belum dijalankan dan program keluarga harapan baru mulai berjalan bulan agustus tahun 2014.(Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB).*

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis, Bapak Dedi Irawan, S.sos mengenai indikator komunikasi dengan pertama Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai komunikasi

yang terjadi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan? Beliau Menjawab:

*Antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Pemerintah Pusat. Antara surat menyurat atau Bab-bab suratnya terjalin kurang baik. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB).*

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Komunikasi secara keseluruhan belum menjalankan tugas nya dengan baik. Sehingga peneliti menyimpulkan mengenai indikator Komunikasi “Kurang Terimplementasi”.

## **2. Sumber Daya**

Keberhasilan dari proses pelaksanaan kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan sebuah proses pelaksanaan. Tetapi diluar dari sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang wajib diperhitungkan juga adalah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Ini dikarenakan ketika sumber daya manusia yang kompeten tersedia sedangkan kecurangan dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah. Maka dari itu semua, perlunya keserasian dan berjalan bersama antara sumber daya ini.

Berikut tanggapan Berikut tanggapan dari 30 responden yang terdiri dari peseta PKH berdasarkan hasil kuisioner, sebagai berikut:

**Tabel V.5 Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai Indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.**

**Desa Sukamaju**

No	Item pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>A.</b>	<b>Staf/SDM</b>				
1.	Staf Menjalankan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial sudah melaksanakan tugasnya dengan baik	30 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	30
2.	Staf Melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada	27 (9%)	3 (1%)	0 (0%)	30
3.	Staf yang menjalankan program keluarga harapan sudah memadai	29 (96%)	1 (3%)	0 (0%)	30
4.	Staf Dinas Sosial sopan/ramah dalam melayani masyarakat yang menerima bantuan dari PKH	19 (63%)	10 (33%)	1 (3%)	30
	Jumlah	105	14	1	120
	Rata-rata	26	3	3	32
	Persentase	86%	43%	1%	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*



Dari Tabel V.5 diatas dapat diketahui bahwa pada indikator Sumber Daya bagian A. Staf/SDM terdapat 4 item penilaian, yang pertama Staf Menjalankan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial sudah melaksanakan tugasnya dengan baik jawaban responden berjumlah 30 orang (1%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi dan pada kategori Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya untuk item penilaian ke dua Staf Melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada jawaban responden berjumlah 27 orang (9%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya untuk item penilaian ke tiga Staf yang menjalankan program keluarga harapan sudah memadai jawaban responden berjumlah 29 orang (96%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%) dan pada kategori Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). selanjutnya untuk item penilaian ke empat Staf Dinas Sosial sopan/ramah dalam melayani masyarakat yang menerima bantuan dari PKH jawaban responden berjumlah 19 orang (63%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 10 orang (33%) dan pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Sumber Daya yaitu sebesar 86%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

No	Item pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>B.</b>	<b>Informasi</b>				
1.	Mendapatkan informasi tentang PKH melalui media massa maupun secara langsung	28 (93%)	2 (6%)	0 (0%)	30
2.	Memperoleh informasi mengenai adanya Program Keluarga Harapan	30 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	30
3.	Sikap pemerintah kabupaten terhadap masyarakat yang menerima bantuan PKH dalam menyampaikan informasi PKH	30 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	30
4.	Pemerintah kecamatan maupun desa melaksanakan rapat antara pendamping dan peserta PKH di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	26 (86%)	3 (1%)	1 (3%)	30
	Jumlah	114	5	1	120
	Rata-rata	28	1	3	32
	Persentase	93%	3%	1%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari Tabel V.5 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Sumber Daya bagian B. Informasi terdapat 4 item penilaian, yang pertama Mendapatkan informasi tentang PKH melalui media massa maupun secara langsung jawaban responden berjumlah 28 orang (93%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 2 orang (6%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang ke dua Memperoleh informasi mengenai adanya Program Keluarga Harapan jawaban responden berjumlah 30 orang (1%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi dan Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang ke tiga Sikap pemerintah kabupaten terhadap masyarakat yang menerima bantuan PKH dalam menyampaikan informasi PKH jawaban responden berjumlah 30 orang (1%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi dan Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0). Selanjutnya item penilaian yang ke empat Pemerintah kecamatan maupun desa melaksanakan rapat antara pendamping dan peserta PKH di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis jawaban responden berjumlah 26 orang (86%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Sumber Daya yaitu sebesar 93%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

No	Item pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>C.</b>	<b>Fasilitas</b>				
1.	Fasilitas yang diberikan pemerintah kabupaten kepada peserta yang menerima bantuan PKH	6 (2%)	24 (8%)	0 (0%)	30
2.	Pemerintah kabupaten memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam menyelesaikan tugas di PKH	30 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	30
3.	Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dalam mendukung PKH	16 (53%)	14 (46%)	0 (0%)	30
4.	Fasilitas yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk pengurusan pengambilan dana peserta PKH sudah memadai	30 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	30
	Jumlah	82	38	1	121
	Rata-rata	20	9	3	32
	Persentase	66%	3%	1%	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*



Dari Tabel V.5 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Sumber Daya bagian C. Fasilitas terdapat 4 item penilaian, yang pertama Fasilitas yang diberikan pemerintah kabupaten kepada peserta yang menerima bantuan PKH jawaban responden berjumlah 6 orang (2%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 24 orang (8%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang kedua Pemerintah kabupaten memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam menyelesaikan tugas di PKH jawaban responden berjumlah 30 orang (1%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi dan Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang ketiga Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dalam mendukung PKH jawaban responden berjumlah 16 orang (53%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 14 orang (46%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang ke empat Fasilitas yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk pengurusan pengambilan dana peserta PKH sudah memadai jawaban responden berjumlah 30 orang (1%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi dan Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Sumber Daya yaitu sebesar 66%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Ibuk Dra. Hj. Martini, MH mengenai indikator Sumber Daya dengan pertanyaan pertama Apakah Dinas Sosial memiliki sarana dan prasarana? (apa saja bentuknya dan apakah sudah memadai) Beliau Menjawab:

*Prasarananya sangat banyak, seperti komputer, laptop, printer, Tv, yang mungkin dikabupaten lain tidak merasakan itu, karna di kabupaten bengkalis sedikit spesial di program keluarga harapan ini. Gedung bangunan sudah disediakan sekretariat itu sendiri, dari pakaian juga sudah memadai, begitu juga dengan pendamping diberikan bantuan operasional oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB).*

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis, Bapak Dedi Irawan, S.sos mengenai indikator Sumber Daya dengan pertama Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i apakah sumber daya yang disediakan itu sudah cukup dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan? Dan bagaimana dengan sarana prasarana yang sudah disediakan? Beliau Menjawab:

*Harapan Dinas Sosial dari sumber daya terkait Program Keluarga Harapan memang harus ditingkatkan lagi khusus dipusat, karna masih banyak kekurangan, dalam arti disediakan namun masih terbatas, jadi harapan dari SDM program keluarga harapan ini bisa di angarkan, misalnya laptop masing-masing untuk pendamping tapi memang sudah dibantu pemerintah pusat daerah walaupun belum semuanya. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB).*

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Komunikasi secara keseluruhan sudah menjalankan tugas nya dengan baik. Sehingga peneliti menyimpulkan mengenai indikator Komunikasi “Terimplementasi”.

## Desa Pasiran

No	Item pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>A.</b>	<b>Staf/SDM</b>				
1.	Staf Menjalankan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial sudah melaksanakan tugasnya dengan baik	28 (93%)	0 (0%)	2 (6%)	30
2.	Staf Melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada	23 (76%)	7 (23%)	0 (0%)	30
3.	Staf yang menjalankan program keluarga harapan sudah memadai	27 (9%)	0 (0%)	3 (1%)	30
4.	Staf Dinas Sosial sopan/ramah dalam melayani masyarakat yang menerima bantuan dari PKH	18 (6%)	12 (4%)	0 (0%)	30
	Jumlah	96	19	5	120
	Rata-rata	24	4	1	29
	Persentase	8%	13%	3%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari Tabel V.5 diatas dapat diketahui bahwa pada indikator Sumber Daya bagian A. Staf/SDM terdapat 4 item penilaian, yang pertama Staf Menjalankan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial sudah melaksanakan tugasnya dengan baik jawaban responden berjumlah 28 orang (93%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi Tidak ada 0(0%). dan pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 2 orang (6%). Selanjutnya untuk item penilaian ke dua Staf Melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada jawaban responden berjumlah 23 orang (76%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 7 orang (23%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya untuk item penilaian ke tiga Staf yang menjalankan program keluarga harapan sudah memadai jawaban responden berjumlah 27 orang (9%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi Tidak ada 0(0%) dan pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%). selanjutnya untuk item penilaian ke empat Staf Dinas Sosial sopan/ramah dalam melayani masyarakat yang menerima bantuan dari PKH jawaban responden berjumlah 18 orang (6%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 12 orang (4%) dan pada kategori Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Sumber Daya yaitu sebesar 13%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Cukup Terimplementasi”.



No	Item pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>B.</b>	<b>Informasi</b>				
1.	Mendapatkan informasi tentang PKH melalui media massa maupun secara langsung	19 (63%)	11 (36%)	0 (0%)	30
2.	Memperoleh informasi mengenai adanya Program Keluarga Harapan	28 (93%)	1 (3%)	1 (3%)	30
3.	Sikap pemerintah kabupaten terhadap masyarakat yang menerima bantuan PKH dalam menyampaikan informasi PKH	28 (93%)	0 (0%)	2 (6%)	30
4.	Pemerintah kecamatan maupun desa melaksanakan rapat antara pendamping dan peserta PKH di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	25 (83%)	0 (0%)	5 (16%)	30
	Jumlah	100	12	8	120
	Rata-rata	25	3	2	30
	Persentase	83%	1%	6%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari Tabel V.5 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Sumber Daya bagian B. Informasi terdapat 4 item penilaian, yang pertama Mendapatkan informasi tentang PKH melalui media massa maupun secara langsung jawaban responden berjumlah 19 orang (63%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 11 orang (36%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang ke dua Memperoleh informasi mengenai adanya Program Keluarga Harapan jawaban responden berjumlah 28 orang (93%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%) dan Kurang Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%). Selanjutnya item penilaian yang ke tiga Sikap pemerintah kabupaten terhadap masyarakat yang menerima bantuan PKH dalam menyampaikan informasi PKH jawaban responden berjumlah 28 orang (93%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi Tidak ada dan Kurang Terimplementasi berjumlah 2 orang (6%). Selanjutnya item penilaian yang ke empat Pemerintah kecamatan maupun desa melaksanakan rapat antara pendamping dan peserta PKH di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis jawaban responden berjumlah 25 orang (83%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah Tidak ada 0(0%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 5 orang (16%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Sumber Daya yaitu sebesar 83%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

No	Item pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>C.</b>	<b>Fasilitas</b>				
1.	Fasilitas yang diberikan pemerintah kabupaten kepada peserta yang menerima bantuan PKH	10 (33%)	20 (66%)	0 (0%)	30
2.	Pemerintah kabupaten memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam menyelesaikan tugas di PKH	29 (96%)	0 (0%)	1 (3%)	30
3.	Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dalam mendukung PKH	17 (56%)	13 (43%)	0 (0%)	30
4.	Fasilitas yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk pengurusan pengambilan dana peserta PKH sudah memadai	25 (83%)	0 (0%)	5 (16%)	30
	Jumlah	81	33	6	120
	Rata-rata	20	8	1	29
	Persentase	66%	26%	3%	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari Tabel V.5 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Sumber Daya bagian C. Fasilitas terdapat 4 item penilaian, yang pertama Fasilitas yang diberikan pemerintah kabupaten kepada peserta yang menerima bantuan PKH jawaban responden berjumlah 10 orang (33%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 20 orang (66%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang kedua Pemerintah kabupaten memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam menyelesaikan tugas di PKH jawaban responden berjumlah 29 orang (96%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi Tidak ada 0(0%) dan Kurang Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%). Selanjutnya item penilaian yang ketiga Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dalam mendukung PKH jawaban responden berjumlah 17 orang(56%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 13 orang (43%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang keempat Fasilitas yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk pengurusan pengambilan dana peserta PKH sudah memadai jawaban responden berjumlah 25 orang (83%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi Tidak 0(0%) ada dan Kurang Terimplementasi berjumlah 5 orang (16%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Sumber Daya yaitu sebesar 66%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Ibuk Dra. Hj. Martini, MH mengenai indikator Sumber Daya dengan pertanyaan pertama Apakah Dinas Sosial memiliki sarana dan prasarana? (apa saja bentuknya dan apakah sudah memadai) Beliau Menjawab:



*Prasarananya sangat banyak, seperti komputer, laptop, printer, Tv, yang mungkin dikabupaten lain tidak merasakan itu, karna di kabupaten bengkalis sedikit spesial di program keluarga harapan ini. Gedung bangunan sudah disediakan sekretariat itu sendiri, dari pakaian juga sudah memadai, begitu juga dengan pendamping diberikan bantuan operasional oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB).*

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis, Bapak Dedi Irawan, S.sos mengenai indikator Sumber Daya dengan pertama Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i apakah sumber daya yang disediakan itu sudah cukup dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan? Dan bagaimana dengan sarana prasarana yang sudah disediakan? Beliau Menjawab:

*Harapan Dinas Sosial dari sumber daya terkait Program Keluarga Harapan memang harus ditingkatkan lagi khusus dipusat, karna masih banyak kekurangan, dalam arti disediakan namun masih terbatas, jadi harapan dari SDM program keluarga harapan ini bisa di angarkan, misalnya laptop masing-masing untuk pendamping tapi memang sudah dibantu pemerintah pusat daerah walaupun belum semuanya. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB).*

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Komunikasi secara keseluruhan sudah menjalankan tugas nya dengan baik. Sehingga peneliti menyimpulkan mengenai indikator Komunikasi “Terimplementasi”.

### Desa Jangkang

No	Item pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>A.</b>	<b>Staf/SDM</b>				
1.	Staf Menjalankan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial sudah melaksanakan tugasnya dengan baik	18 (6%)	4 (13%)	8 (26%)	30
2.	Staf Melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada	13 (43%)	17 (56%)	0 (0%)	30
3.	Staf yang menjalankan program keluarga harapan sudah memadai	18 (6%)	3 (1%)	9 (3%)	30
4.	Staf Dinas Sosial sopan/ramah dalam melayani masyarakat yang menerima bantuan dari PKH	8 (26%)	22 (73%)	0 (0%)	30
	Jumlah	57	46	17	120
	Rata-rata	14	11	4	29
	Persentase	46%	36%	13%	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari Tabel V.5 diatas dapat diketahui bahwa pada indikator Sumber Daya bagian A. Staf/SDM terdapat 4 item penilaian, yang pertama Staf Menjalankan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial sudah melaksanakan tugasnya dengan baik jawaban responden berjumlah 18 orang (6%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 4 orang (13%). dan pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 8 orang (26%). Selanjutnya untuk item penilaian ke dua Staf Melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada jawaban responden berjumlah 13 orang (43%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 17 orang (56%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya untuk item penilaian ke tiga Staf yang menjalankan program keluarga harapan sudah memadai jawaban responden berjumlah 18 orang (6%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%) dan pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 9 orang (3%). selanjutnya untuk item penilaian ke empat Staf Dinas Sosial sopan/ramah dalam melayani masyarakat yang menerima bantuan dari PKH jawaban responden berjumlah 8 orang (26%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 22 orang (73%) dan pada kategori Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Sumber Daya yaitu sebesar 46%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

No	Item pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>B.</b>	<b>Informasi</b>				
1.	Mendapatkan informasi tentang PKH melalui media massa maupun secara langsung	26 (86%)	3 (1%)	1 (3%)	30
2.	Memperoleh informasi mengenai adanya Program Keluarga Harapan	22 (73%)	2 (6%)	6 (2%)	30
3.	Sikap pemerintah kabupaten terhadap masyarakat yang menerima bantuan PKH dalam menyampaikan informasi PKH	24 (8%)	1 (3%)	5 (16%)	30
4.	Pemerintah kecamatan maupun desa melaksanakan rapat antara pendamping dan peserta PKH di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	21 (7%)	3 (1%)	6 (2%)	30
	Jumlah	93	9	18	120
	Rata-rata	23	25	5	53
	Persentase	76%	83%	16%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020



Dari Tabel V.5 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Sumber Daya bagian B. Informasi terdapat 4 item penilaian, yang pertama Mendapatkan informasi tentang PKH melalui media massa maupun secara langsung jawaban responden berjumlah 26 orang (86%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%). Selanjutnya item penilaian yang ke dua Memperoleh informasi mengenai adanya Program Keluarga Harapan jawaban responden berjumlah 22 orang (73%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 2 orang (6%) dan Kurang Terimplementasi berjumlah 6 orang(2%). Selanjutnya item penilaian yang ke tiga Sikap pemerintah kabupaten terhadap masyarakat yang menerima bantuan PKH dalam menyampaikan informasi PKH jawaban responden berjumlah 24 orang (8%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%) dan Kurang Terimplementasi berjumlah 5 orang (16%). Selanjutnya item penilaian yang ke empat Pemerintah kecamatan maupun desa melaksanakan rapat antara pendamping dan peserta PKH di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis jawaban responden berjumlah 21 orang (7%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah berjumlah 3 orang (1%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 6 orang (2%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Sumber Daya yaitu sebesar 83%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Cukup Terimplementasi”.

No	Item pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>C.</b>	<b>Fasilitas</b>				
1.	Fasilitas yang diberikan pemerintah kabupaten kepada peserta yang menerima bantuan PKH	3 (1%)	25 (83%)	2 (6%)	30
2.	Pemerintah kabupaten memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam menyelesaikan tugas di PKH	21 (7%)	2 (6%)	7 (23%)	30
3.	Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dalam mendukung PKH	9 (3%)	20 (66%)	1 (3%)	30
4.	Fasilitas yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk pengurusan pengambilan dana peserta PKH sudah memadai	19 (63%)	7 (23%)	4 (13%)	30
	Jumlah	52	54	14	120
	Rata-rata	13	13	3	29
	Persentase	43%	43%	1%	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari Tabel V.5 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Sumber Daya bagian C. Fasilitas terdapat 4 item penilaian, yang pertama Fasilitas yang diberikan pemerintah kabupaten kepada peserta yang menerima bantuan PKH jawaban responden berjumlah 3 orang (1%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 25 orang (83%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 2 orang (6%). Selanjutnya item penilaian yang kedua Pemerintah kabupaten memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam menyelesaikan tugas di PKH jawaban responden berjumlah 21 orang (7%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 2 orang (6%) dan Kurang Terimplementasi berjumlah 7 orang (23%). Selanjutnya item penilaian yang ketiga Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dalam mendukung PKH jawaban responden berjumlah 9 orang (3%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 20 orang (66%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%). Selanjutnya item penilaian yang ke empat Fasilitas yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk pengurusan pengambilan dana peserta PKH sudah memadai jawaban responden berjumlah 19 orang (63%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 7 orang (23%) dan Kurang Terimplementasi berjumlah 4 orang (13%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Sumber Daya yaitu sebesar 43%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Cukup Terimplementasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Ibuk Dra. Hj. Martini, MH mengenai indikator Sumber Daya dengan pertanyaan pertama Apakah Dinas Sosial sering menyampaikan informasi kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan? (disampaikan dalam bentuk apa) Beliau Menjawab:

*Pasti disampaikan, informasi yang diperoleh kabupaten khususnya Dinas Sosial pasti disampaikan kepada penerima Program Keluarga Harapan. Dalam bentuk pertemuan kelompok yang dilakukan oleh pendamping biasanya informasi yang diperoleh dari pusat pasti sampai kepada koordinator Kabupaten, setelah ke koordinator kabupaten setelah itu informasikan lagi kepada pendamping, dari situlah pendamping mengumpulkan KPM dalam bentuk rapat dan akan disampaikan pendamping ke KPM. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB).*

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis, Bapak Dedi Irawan, S.sos mengenai indikator Sumber Daya dengan pertama Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i apakah sumber daya yang disediakan itu sudah cukup dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan? Dan bagaimana dengan sarana prasarana yang sudah disediakan? Beliau Menjawab:

*Harapan Dinas Sosial dari sumber daya terkait Program Keluarga Harapan memang harus ditingkatkan lagi khusus dipusat, karna masih banyak kekurangan, dalam arti disediakan namun masih terbatas, jadi harapan dari SDM program keluarga harapam ini bisa di angarkan, misalnya laptop masing-masing untuk pendamping tapi memang sudah dibantu pemerintah pusat daerah walaupun belum semuanya. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB).*



Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sumber Daya secara keseluruhan masih serba kekurangan. Sehingga peneliti menyimpulkan mengenai indikator Komunikasi “Cukup Terimplementasi”.

### 3. Disposisi

Disposisi adalah sikap birokrasi atau pelaksana yang berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut seperti niat, kemauan, motivasi, dan psikologi untuk melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang dalam ha ini adalah disposisi dalam mengimplementasikan program keluarga harapan di Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Berikut tanggapan dari 30 responden yang terdiri dari peseta PKH berdasarkan hasil kuisisioner, sebagai berikut:

**Tabel V.6 Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai Indikator Disposisi terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.**

**Desa Sukamaju**

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>A.</b>	<b>Efek Disposisi</b>				
1.	Sikap Dinas Sosial kabupaten bengkalis dalam menyelesaikan tugas PKH	17 (56%)	13 (43%)	0 (0%)	30
2	Menerima perlakuan/tindakan yang kurang enak dari staf PKH	0 (0%)	0 (0%)	30 (1%)	30
3.	Melaksanakan kebijakan di PKH dengan baik	24 (8%)	6 (2%)	0 (0%)	30
4.	Mengetahui aturan-aturan yang ditetapkan oleh pelaksana PKH dalam pengambilan dana program PKH	24 (8%)	6 (2%)	0 (0%)	30
	Jumlah	65	25	30	120
	Rata-rata	16	6	7	29
	Persentase	53%	2%	23%	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari Tabel V.6 diatas dapat diketahui bahwa pada indikator Disposisi bagian A. Efek Disposisi terdapat 4 item penilaian, yang pertama Sikap Dinas Sosial kabupaten bengkalis dalam menyelesaikan tugas PKH jawaban responden berjumlah 17 orang (56%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 13 orang (43%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang kedua Menerima perlakuan/tindakan yang kurang enak dari staf PKH jawaban responden Terimplementasi dan Cukup Terimplementasi tidak ada 0(0%). Sedangkan berada pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 30 orang (1%). Selanjutnya item penilaian yang ketiga Melaksanakan kebijakan di PKH dengan baik jawaban responden berjumlah 24 orang (8%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup terimplementasi 6 orang (2%). Dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang keempat Mengetahui aturan-aturan yang ditetapkan oleh pelaksana PKH dalam pengambilan dana program PKH jawaban responden berjumlah 24 orang (8%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup terimplementasi 6 orang (2%). Dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Disposisi yaitu sebesar 53%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>B.</b>	<b>Melakukan Peraturan Birokrasi</b>				
1.	Penilaian staf Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya	27 (9%)	3 (1%)	0 (0%)	30
2.	Staf menunjukkan sikap yang positif dalam memberikan pelayanan terhadap peserta PKH	24 (8%)	6 (2%)	0 (0%)	30
3.	Pelayanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat yang menerima bantuan dari PKH	21 (7%)	9 (3%)	0 (0%)	30
4.	Kemampuan dan kapasitas para staf yang menjalankan PKH	20 (66%)	10 (33%)	0 (0%)	30
	Jumlah	92	28	0	120
	Rata-rata	23	7	0	52
	Persentase	76%	23%	(0%)	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*



Dari Tabel V.6 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Disposisi bagian B. Melakukan Peraturan Birokrasi terdapat 4 item penilaian, yang pertama Penilaian staf Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya jawaban responden berjumlah 27 orang (9%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang kedua Staf menunjukkan sikap yang positif dalam memberikan pelayanan terhadap peserta PKH jawaban responden berjumlah 24 orang (8%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 6 orang (2%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang ketiga Pelayanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat yang menerima bantuan dari PKH jawaban responden berjumlah 21 orang (7%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 9 orang (3%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(%). Selanjutnya item penilaian yang ke empat Kemampuan dan kapasitas para staf yang menjalankan PKH jawaban responden berjumlah 20 orang (66%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 10 orang (33%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Disposisi yaitu sebesar 76%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Ibuk Dra. Hj. Martini, MH mengenai indikator Disposisi dengan

pertanyaan pertama Bagaimana sikap Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas program keluarga harapan? Beliau Menjawab:

*Sikap Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas program keluarga harapan sangat mendukung sekali, program keluarga harapan sangat dibanggakan, sangat diutamakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sangat peduli dengan Program Keluarga Harapan. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB).*

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis, Bapak Dedi Irawan, S.sos mengenai indikator Disposisi dengan pertama Apakah ada pengaruh yang baik atau buruk mengenai perlakuan atau sikap pemerintah setelah dilaksanakannya program keluarga harapan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis? Beliau Menjawab:

*Pengaruh baik dan buruknya tergantung persenya, tetapi lebih banyak baiknya, dalam arti KPM program keluarga harapan mengangap bantuan PKH ini bukan hanya sekedar bantuan saja tetapi bantuan yang diterimanya disertai dengan ilmu yang diperoleh KPM seperti dalam pertemuan kelompok. KPM itu edukasi dalam arti pembelajaran belajar bersama, jika ada keluhan disampaikan di dalam forum, jadi seperti sekolah setiap saat dilakukan 1 bulan minimal sekali wajib dilakukan pertemuan kelompok dan mulai pada tahun 2019 diwajibkan melakukan FDS (Family Development Sisent) itu pertemuan seperti sekolah untuk melakukan pembelajaran tentang cara menabung, tentang pentingnya pendidikan anak, tentang lansia, bagaimana cara merawat lansia, itu sangat dianjurkan oleh*

pemerintah pusat kepada SDM program keluarga harapan Kabupaten Bengkalis dan seluruh SDM indonesia. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Disposisi secara keseluruhan sudah menjalankan tugas nya dengan baik. Sehingga peneliti menyimpulkan mengenai indikator Disposisi “Terimplementasi”.

### Desa Pasiran

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>A.</b>	<b>Efek Disposisi</b>				
1.	Sikap Dinas Sosial kabupaten bengkalis dalam menyelesaikan tugas PKH	16 (53%)	14 (46%)	0 (0%)	30
2	Menerima perlakuan/tindakan yang kurang enak dari staf PKH	0 (0%)	0 (0%)	30 (1%)	30
3.	Melaksanakan kebijakan di PKH dengan baik	16 (53%)	14 (46%)	0 (0%)	30
4.	Mengetahui aturan-aturan yang ditetapkan oleh pelaksana PKH dalam pengambilan dana program PKH	17 (56%)	13 (43%)	0 (0%)	30
	Jumlah	49	41	30	120
	Rata-rata	12	10	7	29
	Persentase	4%	33%	23%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari Tabel V.6 diatas dapat diketahui bahwa pada indikator Disposisi bagian A. Efek Disposisi terdapat 4 item penilaian, yang pertama Sikap Dinas Sosial kabupaten bengkalis dalam menyelesaikan tugas PKH jawaban responden berjumlah 16 orang (53%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 14 orang (46%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang kedua Menerima perlakuan/tindakan yang kurang enak dari staf PKH jawaban responden Terimplementasi dan Cukup Terimplementasi tidak ada 0(0%). Sedangkan berada pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 30 orang (1%). Selanjutnya item penilaian yang ketiga Melaksanakan kebijakan di PKH dengan baik jawaban responden berjumlah 16 orang (53%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup terimplementasi 14 orang (46%). Dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang ke empat Mengetahui aturan-aturan yang ditetapkan oleh pelaksana PKH dalam pengambilan dana program PKH jawaban responden berjumlah 17 orang (56%) yang Terimplentasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 13 orang (43%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Disposisi yaitu sebesar 33%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Cukup Terimplementasi”.



No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>B.</b>	<b>Melakukan Peraturan Birokrasi</b>				
1.	Penilaian staf Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya	16 (53%)	14 (46%)	0 (0%)	30
2.	Staf menunjukkan sikap yang positif dalam memberikan pelayanan terhadap peserta PKH	21 (7%)	9 (3%)	0 (0%)	30
3.	Pelayanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat yang menerima bantuan dari PKH	17 (56%)	13 (43%)	0 (0%)	30
4.	Kemampuan dan kapasitas para staf yang menjalankan PKH	20 (66%)	9 (3%)	1 (3%)	30
	Jumlah	74	45	1	120
	Rata-rata	18	11	25	52
	Persentase	6%	36%	83%	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari Tabel V.6 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Disposisi bagian B. Melakukan Peraturan Birokrasi terdapat 4 item penilaian, yang pertama Penilaian staf Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya jawaban responden berjumlah 16 orang (53%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 14 orang (46%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang kedua Staf menunjukkan sikap yang positif dalam memberikan pelayanan terhadap peserta PKH jawaban responden berjumlah 21 orang (7%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 9 orang (3%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang ketiga Pelayanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat yang menerima bantuan dari PKH jawaban responden berjumlah 17 orang (56%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 13 orang (43%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang ke empat Kemampuan dan kapasitas para staf yang menjalankan PKH jawaban responden berjumlah 20 orang (66%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 9 orang (3%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Disposisi yaitu sebesar 83%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Kurang Terimplementasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Ibu Dra. Hj. Martini, MH mengenai indikator Disposisi dengan pertanyaan pertama Bagaimana sikap Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas program keluarga harapan? Beliau Menjawab:

*Sikap Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas program keluarga harapan sangat mendukung sekali, program keluarga harapan sangat dibanggakan, sangat diutamakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sangat peduli dengan Program Keluarga Harapan. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB).*

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis, Bapak Dedi Irawan, S.sos mengenai indikator Disposisi dengan pertanyaan Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai sikap para pelaksana dalam mensukseskan pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis? Beliau Menjawab:

*Khusus di Kecamatan bantan, Bengkalis, Siak kecil, Rupal utara, memang kendalanya sedikit. Ibarat kata lebih banyak bagusnya dari pada tidak bagusnya. Hanya ada beberapa kendala, mungkin dari personal KPM nya dalam arti kalau kabupaten bengkalis dan bantan memang tempatan, sedangkan mandau pinggir banyak orang yang tidak asli tempatan, jadi sulit untuk mengatur jadi terjadi sedikit kendala oleh pendamping. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB).*

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Disposisi secara keseluruhan masih banyak kekurangan. Sehingga peneliti menyimpulkan mengenai indikator Komunikasi “Kurang Terimplementasi”.

### Desa Jangkang

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>A.</b>	<b>Efek Disposisi</b>				
1.	Sikap Dinas Sosial kabupaten bengkalis dalam menyelesaikan tugas PKH	8 (26%)	21 (7%)	1 (3%)	30
2	Menerima perlakuan/tindakan yang kurang enak dari staf PKH	0 (0%)	0 (0%)	30 (1%)	30
3.	Melaksanakan kebijakan di PKH dengan baik	14 (46%)	12 (4%)	4 (13%)	30
4.	Mengetahui aturan-aturan yang ditetapkan oleh pelaksana PKH dalam pengambilan dana program PKH	6 (2%)	21 (7%)	3 (1%)	30
	Jumlah	28	54	38	120
	Rata-rata	7	13	9	29
	Persentase	23%	43%	3%	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*



Dari Tabel V.6 diatas dapat diketahui bahwa pada indikator Disposisi bagian A. Efek Disposisi terdapat 4 item penilaian, yang pertama Sikap Dinas Sosial kabupaten bengkalis dalam menyelesaikan tugas PKH jawaban responden berjumlah 8 orang (26%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 21 orang (7%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%). Selanjutnya item penilaian yang kedua Menerima perlakuan/tindakan yang kurang enak dari staf PKH jawaban responden Terimplementasi dan Cukup Terimplementasi tidak ada. Sedangkan berada pada kategori Kurang Terimplementasi berjumlah 30 orang (1%). Selanjutnya item penilaian yang ketiga Melaksanakan kebijakan di PKH dengan baik jawaban responden berjumlah 14 orang (46%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup terimplementasi 12 orang (4%). Dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 4 orang (13%). Selanjutnya item penilaian yang ke empat Mengetahui aturan-aturan yang ditetapkan oleh pelaksana PKH dalam pengambilan dana program PKH jawaban responden berjumlah 6 orang (2%) yang Terimplentasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 21 orang (7%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Disposisi yaitu sebesar 43%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Cukup Terimplementasi”.

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>B.</b>	<b>Melakukan Peraturan Birokrasi</b>				
1.	Penilaian staf Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya	13 (43%)	14 (46%)	3 (1%)	30
2.	Staf menunjukkan sikap yang positif dalam memberikan pelayanan terhadap peserta PKH	15 (5%)	14 (46%)	1 (3%)	30
3.	Pelayanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat yang menerima bantuan dari PKH	11 (36%)	14 (46%)	5 (16%)	30
4.	Kemampuan dan kapasitas para staf yang menjalankan PKH	7 (23%)	23 (76%)	0 (0%)	30
	Jumlah	46	65	9	120
	Rata-rata	11	16	25	52
	Persentase	36%	53%	83%	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari Tabel V.6 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Disposisi bagian B. Melakukan Peraturan Birokrasi terdapat 4 item penilaian, yang pertama Penilaian staf Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya jawaban responden berjumlah 13 orang (43%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 14 orang (46%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%). Selanjutnya item penilaian yang kedua Staf menunjukkan sikap yang positif dalam memberikan pelayanan terhadap peserta PKH jawaban responden berjumlah 15 orang (5%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 14 orang (46%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%). Selanjutnya item penilaian yang ketiga Pelayanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat yang menerima bantuan dari PKH jawaban responden berjumlah 11 orang (36%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 14 orang (46%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 5 orang (16%). Selanjutnya item penilaian yang ke empat Kemampuan dan kapasitas para staf yang menjalankan PKH jawaban responden berjumlah 7 orang (23%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 23 orang (76%) dan yang Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 4 item penilaian indikator Disposisi yaitu sebesar 83%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Kurang Terimplementasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Ibuk Dra. Hj. Martini, MH mengenai indikator Disposisi dengan

pertanyaan pertama Bagaimana sikap Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas program keluarga harapan? Beliau Menjawab:

*Sikap Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas program keluarga harapan sangat mendukung sekali, program keluarga harapan sangat dibanggakan, sangat diutamakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sangat peduli dengan Program Keluarga Harapan. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB).*

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis, Bapak Dedi Irawan, S.sos mengenai indikator Disposisi dengan pertama Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai sikap para pelaksana dalam mensukseskan pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis? Beliau Menjawab:

*Khusus di Kecamatan bantan, Bengkalis, Siak kecil, Rupas utara, memang kendalanya sedikit. Ibarat kata lebih banyak bagusnya dari pada tidak bagusnya. Hanya ada beberapa kendala, mungkin dari personal KPM nya dalam arti kalau kabupaten bengalis dan bantan memang tempatan, sedangkan mandau pinggir banyak orang yang tidak asli tempatan, jadi sulit untuk mengatur jadi terjadi sedikit kendala oleh pendamping. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB).*

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Disposisi secara keseluruhan masih banyak kekurangan. Sehingga peneliti menyimpulkan mengenai indikator Komunikasi “Kurang Terimplementasi”.



#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah pelaksana dalam kebijakan tersebut, yang dimaksud dalam hal ini adalah struktur organisasi yang memiliki kesesuaian yang tetap untuk menjadi implementor dalam penyelenggara suatu kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah kejelasan struktur birokrasi Dinas Sosial dalam mengimplementasikan program keluarga harapan di Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Berikut tanggapan dari 30 responden yang terdiri dari peserta PKH berdasarkan hasil kuisioner, sebagai berikut:

**Tabel V.7 Distribusi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai Indikator Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.**

##### Desa Sukamaju

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>A.</b>	<b>Membuat Sop</b>				
1.	Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas PKH sesuai Prosedur/SOP yang berlaku	30 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	30
2.	Staf Dinas Sosial yang pernah melakukan tugas PKH diluar	0	18	12	30

	ketentuan Prosedur/SOP yang berlaku	(0%)	(6%)	(4%)	
	Jumlah	30	18	12	60
	Rata-rata	15	9	6	30
	Persentase	5%	3%	2%	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari Tabel V.7 diatas dapat diketahui bahwa pada indikator Struktur Birokrasi bagian A. Membuat SOP terdapat 2 item penilaian, yang pertama Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas PKH sesuai Prosedur/SOP yang berlaku jawaban responden berjumlah 30 orang (1%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi dan Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian ke dua Staf Dinas Sosial yang pernah melakukan tugas PKH diluar ketentuan Prosedur/SOP yang berlaku yang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 18 orang (6%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 12 orang (4%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 2 item penilaian indikator Struktur Birokrasi yaitu sebesar 5%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>B.</b>	<b>Melaksanakan Fragmentasi</b>				
1.	Petugas Dinas Sosial sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing	30 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	30 (%)
2.	Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas PKH berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing	30 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	30
	Jumlah	90	0	0	90
	Rata-rata	45	0	0	45
	Persentase	5%	0%	0%	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari Tabel V.7 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Struktur Birokrasi bagian B. Melaksanakan Fragmentasi terdapat 2 item penilaian, yang pertama Petugas Dinas Sosial sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing jawaban responden berjumlah 30 orang (1%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi dan Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Selanjutnya item penilaian yang kedua Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas PKH berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing jawaban responden berjumlah 30 orang (1%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi dan Kurang Terimplementasi Tidak ada 0(0%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 2 item penilaian indikator Struktur Birokrasi yaitu sebesar 5%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Ibuk Dra. Hj. Martini, MH mengenai indikator Struktur Birokrasi dengan pertanyaan pertama Apakah Dinas Sosial sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing? Beliau Menjawab:

*Sudah, Kepala bidang petugas sebagai ketua program keluarga harapan kepala Dinas dibidang sebagai penanggung jawab, koordinator program keluarga harapan sebagai penanggung jawab dengan pendampingnya sudah dilakukan dan sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB).*



Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis, Bapak Dedi Irawan, S.sos mengenai indikator Struktur Birokrasi dengan pertama Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai Prosedur/SOP apakah pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku? Beliau Menjawab:

*Sesuai dengan prosedur sesuai dengan SOP tentang program keluarga harapan memang sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, ada kendala-kendalanya dalam arti terkadang KPM ada yang pindah duluan ke daerah lain tanpa memberi informasikan kepada pendamping. Bahwa orang yang di provinsi melaporkan ke Dinas Sosial, sebenarnya itu yang tidak boleh dilakukan tetapi Dinas Sosial saling bekerja sama antara provinsi tujuan atau Kabupaten tujuan dengan kabupaten kita sendiri kita saling bekerja sama mana yang dulu melakukan itu yang melapor. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB).*

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Struktur Birokrasi secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik. Sehingga peneliti menyimpulkan mengenai indikator Struktur Birokrasi “Terimplementasi”.

### Desa Pasiran

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>A.</b>	<b>Membuat Sop</b>				
1.	Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas PKH sesuai Prosedur/SOP yang berlaku	29 (96%)	0 (0%)	1 (3%)	30
2.	Staf Dinas Sosial yang pernah melakukan tugas PKH diluar ketentuan Prosedur/SOP yang berlaku	0 (0%)	22 (73%)	8 (26%)	30
	Jumlah	29	22	9	60
	Rata-rata	14	11	4	29
	Persentase	46%	36%	13%	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari Tabel V.7 diatas dapat diketahui bahwa pada indikator Struktur Birokrasi bagian A. Membuat SOP terdapat 2 item penilaian, yang pertama Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas PKH sesuai Prosedur/SOP yang berlaku jawaban responden berjumlah 29 orang (96%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi Tidak ada 0(0%) dan yang Kurang

Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%). Selanjutnya item penilaian ke dua Staf Dinas Sosial yang pernah melakukan tugas PKH diluar ketentuan Prosedur/SOP yang berlaku yang Terimplementasi Tidak ada 0(0%). Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 22 orang (73%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 8 orang (26%). Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 2 item penilaian indikator Struktur Birokrasi yaitu sebesar 46%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>B.</b>	<b>Melaksanakan Fragmentasi</b>				
1.	Petugas Dinas Sosial sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing	29 (96%)	0 (0%)	1 (3%)	30 (%)
2.	Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas PKH berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing	24 (8%)	0 (0%)	6 (2%)	30
	Jumlah	53	0	7	60
	Rata-rata	26	0	3	29
	Persentase	86%	0%	1%	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari Tabel V.7 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Struktur Birokrasi bagian B. Melaksanakan Fragmentasi terdapat 2 item penilaian, yang pertama Petugas Dinas Sosial sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing jawaban responden berjumlah 29 orang (96%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi Tidak ada 0(0%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%). Selanjutnya item penilaian yang kedua Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas PKH berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing jawaban responden berjumlah 24 orang (8%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi Tidak ada 0(0%) dan Kurang Terimplementasi berjumlah 6 orang (2%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 2 item penilaian indikator Struktur Birokrasi yaitu sebesar 86%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Ibuk Dra. Hj. Martini, MH mengenai indikator Struktur Birokrasi dengan pertanyaan pertama Apakah Dinas Sosial sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing? Beliau Menjawab:

*Sudah, Kepala bidang petugas sebagai ketua program keluarga harapan kepala Dinas dibidang sebagai penanggung jawab, koordinator program keluarga harapan sebagai penanggung jawab dengan pendampingnya sudah*



*dilakukan dan sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB).*

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis, Bapak Dedi Irawan, S.sos mengenai indikator Struktur Birokrasi dengan pertama Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai Prosedur/SOP apakah pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku? Beliau Menjawab:

*Sesuai dengan prosedur sesuai dengan SOP tentang program keluarga harapan memang sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, ada kendala-kendalanya dalam arti terkadang KPM ada yang pindah duluan ke daerah lain tanpa memberi informasikan kepada pendamping. Bahwa orang yang di provinsi melaporkan ke Dinas Sosial, sebenarnya itu yang tidak boleh dilakukan tetapi Dinas Sosial saling bekerja sama antara provinsi tujuan atau Kabupaten tujuan dengan kabupaten kita sendiri kita saling bekerja sama mana yang dulu melakukan itu yang melapor. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB).*

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Struktur Birokrasi secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik. Sehingga peneliti menyimpulkan mengenai indikator Struktur Birokrasi “Terimplementasi”.

### Desa Jangkang

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>A.</b>	<b>Membuat Sop</b>				
1.	Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas PKH sesuai Prosedur/SOP yang berlaku	26 (86%)	1 (3%)	3 (1%)	30 (%)
2.	Staf Dinas Sosial yang pernah melakukan tugas PKH diluar ketentuan Prosedur/SOP yang berlaku	1 (3%)	14 (46%)	15 (5%)	30
	Jumlah	27	15	18	60
	Rata-rata	13	7	9	29
	Persentase	43%	23%	3%	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari Tabel V.7 diatas dapat diketahui bahwa pada indikator Struktur Birokrasi bagian A. Membuat SOP terdapat 2 item penilaian, yang pertama Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas PKH sesuai Prosedur/SOP yang berlaku jawaban responden berjumlah 26 orang (86%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 1 orang (3%) dan yang Kurang

Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%). Selanjutnya item penilaian ke dua Staf Dinas Sosial yang pernah melakukan tugas PKH diluar ketentuan Prosedur/SOP yang berlaku berjumlah 1 orang (3%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 14 orang (46%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 15 orang (5%). Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 2 item penilaian indikator Struktur Birokrasi yaitu sebesar 43%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
<b>B.</b>	<b>Melaksanakan Fragmentasi</b>				
1.	Petugas Dinas Sosial sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing	22 (73%)	2 (6%)	6 (2%)	30 (%)
2.	Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas PKH berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing	20 (66%)	3 (1%)	7 (23%)	30
	Jumlah	42	5	13	60
	Rata-rata	21	2	6	29
	Persentase	7%	6%	2%	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari Tabel V.7 diatas dapat diketahui Bahwa pada indikator Struktur Birokrasi bagian B. Melaksanakan Fragmentasi terdapat 2 item penilaian, yang pertama Petugas Dinas Sosial sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing jawaban responden berjumlah 22 orang (73%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 2 orang (6%) dan yang Kurang Terimplementasi berjumlah 6 orang (2%). Selanjutnya item penilaian yang kedua Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas PKH berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing jawaban responden berjumlah 20 orang (66%) yang Terimplementasi. Sedangkan berada pada kategori Cukup Terimplementasi berjumlah 3 orang (1%) dan Kurang Terimplementasi berjumlah 7 orang (23%).

Dengan keseluruhan jawaban ini, maka nilai rata-rata yang didapatkan dari keseluruhan 2 item penilaian indikator Struktur Birokrasi yaitu sebesar 7%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Ibuk Dra. Hj. Martini, MH mengenai indikator Struktur Birokrasi dengan pertanyaan pertama Apakah Dinas Sosial sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing? Beliau Menjawab:

*Sudah, Kepala bidang petugas sebagai ketua program keluarga harapan kepala Dinas dibidang sebagai penanggung jawab, koordinator program keluarga harapan sebagai penanggung jawab dengan pendampingnya sudah*



*dilakukan dan sudah bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB).*

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis, Bapak Dedi Irawan, S.sos mengenai indikator Struktur Birokrasi dengan pertama Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai Prosedur/SOP apakah pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku? Beliau Menjawab:

*Sesuai dengan prosedur sesuai dengan SOP tentang program keluarga harapan memang sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, ada kendala-kendalanya dalam arti terkadang KPM ada yang pindah duluan ke daerah lain tanpa memberi informasikan kepada pendamping. Bahwa orang yang di provinsi melaporkan ke Dinas Sosial, sebenarnya itu yang tidak boleh dilakukan tetapi Dinas Sosial saling bekerja sama antara provinsi tujuan atau Kabupaten tujuan dengan kabupaten kita sendiri kita saling bekerja sama mana yang dulu melakukan itu yang melapor. (Wawancara, Selasa 25 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB).*

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Struktur Birokrasi secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik. Sehingga peneliti menyimpulkan mengenai indikator Struktur Birokrasi “Terimplementasi”.

**Tabel V.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.**

**Rekapitulasi Desa Sukamaju**

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1.	Komunikasi	26 (86%)	4 (13%)	0 (0%)	30
		22 (73%)	7 (23%)	5 (16%)	
2.	Sumber Daya	22 (73%)	6 (2%)	1 (3%)	30
		26 (86%)	3 (43%)	3 (1%)	
		28 (93%)	1 (3%)	3 (1%)	30
		20 (66%)	9 (3%)	3 (1%)	
3.	Disposisi	16 (53%)	6 (2%)	7 (23%)	30
		23 (76%)	7 (23%)	0 (0%)	

4.	Struktur Birokrasi	15 (5%)	9 (3%)	6 (2%)	30
		45 (5%)	0 (0%)	0 (0%)	30
	Jumlah	243	52	28	300
	Rata-rata	60	13	7	146
	Persentase	8%	2%	9%	100%

Sumber : Data Hasil Olahan 2020

### Rekapitulasi Desa Pasiran

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1.	Komunikasi	21 (25%)	6 (2%)	5 (16%)	30
		24 (8%)	4 (13%)	25 (83%)	30
		20 (66%)	5 (16%)	4 (13%)	30
2.	Sumber Daya	24 (8%)	4 (13%)	1 (3%)	30
		25 (83%)	3 (1%)	2 (6%)	30

		20 (66%)	8 (26%)	1 (3%)	30
3.	Disposisi	12 (4%)	10 (33%)	7 (23%)	30
		18 (6%)	11 (36%)	25 (83%)	30
4.	Struktur Birokrasi	14 (46%)	11 (36%)	4 (13%)	30
		26 (83%)	0 (0%)	3 (1%)	30
	Jumlah	204	62	77	300
	Rata-rata	51	15	19	85
	Persentase	6%	2%	56%	100%

Sumber : Data Hasil Olahan 2020

### Rekapitulasi Desa Jangkang

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1.	Komunikasi	17 (56%)	8 (26%)	5 (16%)	30
		13 (43%)	10 (33%)	6 (2%)	30



		15 (5%)	6 (2%)	7 (23%)	30
2.	Sumber Daya	14 (46%)	11 (36%)	4 (13%)	30
Perpustakaan Universitas Islam Riau		23 (76%)	25 (83%)	5 (16%)	30
		13 (43%)	13 (43%)	3 (1%)	30
	3. Disposisi	7 (23%)	13 (43%)	9 (3%)	30
		11 (36%)	16 (53%)	25 (83%)	30
4.	Struktur Birokrasi	13 (43%)	7 (23%)	9 (3%)	30
		21 (7%)	2 (6%)	6 (2%)	30
	Jumlah	147	111	79	300
	Rata-rata	36	27	19	82
	Persentase	4%	3%	6%	100%

Sumber : Data Hasil Olahan 2020

Dari tabel V.8 diatas tentang Rekapitulasi Tanggapan Responden Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Dari 3 Desa dapat diketahui bahwa Desa Sukamaju sebanyak 60 orang atau 8% yang mengatakan Terimplementasi, kemudian sebanyak 13 orang atau 2% mengatakan Cukup Terimplementasi. Selanjutnya yang mengatakan Kurang Terimplementasi sebanyak 7 orang atau 9% Responden.

Selanjutnya untuk Desa Pasiran sebanyak 51 orang atau 6% mengatakan Terimplementasi. Kemudian sebanyak 15 orang 2% mengatakan Cukup Terimplementasi, selanjutnya yang mengatakan Kurang Terimplementasi sebanyak 19 atau 56% Responden.

Selanjutnya untuk Desa Jangkang sebanyak 36 orang 4% mengatakan Terimplementasi. Kemudian sebanyak 27 orang 3% mengatakan Cukup Terimplementasi, selanjutnya yang mengatakan Kurang Terimplementasi sebanyak 19 orang atau 6% Responden.

Mencermati analisa diatas dari hasil kuisisioner, wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dikategorikan **Cukup Terimplementasi**. Artinya dari beberapa indikator tersebut masih ada yang belum maksimal, karna masih kurangnya sumber daya pendukung maupun sumber daya manusia sehingga Program Keluarga Harapan belum berjalan dengan baik atau belum berjalan secara maksimal.

### **C. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Hambatan untuk indikator Komunikasi adalah pelaksanaan PKH sulit berkomunikasi dengan peserta PKH yang tidak mengerti Bahasa Indonesia. Ada sebagai peserta PKH yang tinggal dipelosok desa dan mereka hanya menggunakan Bahasa daerah sebagai Bahasa sehari-hari.
2. Hambatan untuk indikator Sumber Daya adalah masih ada pemungutan atau potongan uang sebesar Rp. 10.000 dari agen-agen kecil bagi peserta yang ingin mengambil uang penerimaan PKH.
3. Hambatan untuk Disposisi adalah masih ada kendala dari pemerintah pusat terhadap orang yang menerima bantuan PKH seperti orang yang bukan asli tempatan susah untuk diatur tidak mau mendengarkan apa yang di sampaikan atau di informasikan oleh pemerintah pusat.
4. Hambatan untuk Struktur Birokrasi adalah belum dilaksanakan dengan maksimal, masih banyak kendala-kendala nya orang yang pindah kedaerah yang lain tanpa melapor kepada pihak pendamping itu akan mempersulit pihak pendamping.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, banyak yang telah peneliti temui berdasarkan empat indikator yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Maka dari itu penulis telah menarik beberapa kesimpulan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk indikator komunikasi yang memiliki item penilaian sosialisasi kepada masyarakat, kejelasan informasi, dan rapat antara pendamping dan keseluruhan hasil yang didapatkan ialah terlaksana. Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menjaga komunikasi antara pemerintah dengan peserta PKH. Informasi - informasi yang ada selalu diturunkan ke peserta PKH. Agar peserta tidak kebingungan jika terjadi keterlambatan pencairan dana.
2. Untuk indikator sumber daya dengan item penilaian sumber daya dari keseluruhan hasil yang didapatkan ialah Cukup Terimplementasi. Yang menjadi permasalahan hanyalah adanya pemungutan uang sebesar Rp. 10.000 yang dilakukan dari agen-agen kecil saat peserta PKH mencairkan dana PKH nya. Dari pihak pemerintah daerah sudah melakukan pelaksanaan PKH dengan baik dan dari hasil wawancara yang didapatkan bahwasannya para pendamping diberikan pelatihan ataupun diklat nasional.



3. Untuk indikator disposisi berada pada kategori Cukup Terimplementasi, karna Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas PKH belum optimal, dalam melaksanakan tugasnya banyak yang tidak selesai selalu mengundur-undur waktu.
4. Untuk indikator Struktur Birokrasi berada pada kategori Terimplementasi. Karna sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin dan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing.

#### **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang ingin peneliti buat dari keseluruhan hasil yang telah didapatkan :

1. Demi terimplementasinya PKH dengan baik, peneliti mengharapkan kepada para petugas PKH yang ditanggung jawab oleh Dinas Sosial agar lebih teliti dan bersikap tegas dalam mendata ulang masyarakat yang benar-benar berhak menerima dana ini jangan terjadi kesalahan yang merugikan pemerintah. Agar tujuan yang sesungguhnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bisa berjalan dengan baik.
2. Kepada petugas PKH terutama pendamping disetiap kecamatan untuk melakukan pengawasan disetiap pencairan dana, agar tidak ada lagi biaya pengambilan diagen-agen kecil tersebut.
3. Perlunya pengawasan ketat dari pemerintah tentang penggunaan dana yang digunakan peserta PKH, jika ada yang menggunakan dana diluar dari bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial berikan sanksi atau dikeluarkan dari peserta penerima dana PKH.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang akan mengangkat topik yang sama, sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap masalah yang akan diteliti.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akdun, 2009. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Pasalog, Harbani. 2007. *Teori Adminitrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Admiinistrasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT. Bumi aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Thoha, Mitha 2007. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada.
- Hamim, sufian, 2005. *Administrasi, Organisasi, Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Hamim, Sufian, 2014. *Filsafat Ilmu, Ilmu pengetahuan dan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Press.
- Sudaryono. 2017. *Metode Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Melayu, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Alex Media Kompetindo.

Sjamsuddin Indradi, Sjamsiar, 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.

Agustino, Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Zaini Ali, Raden, 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru-Riau, Penerbit Marpoyan Tujuh Publishing.

Wahab, soliehin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, soliehin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.

Suharto, Edi 2012. *Analisis kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Duun, W William. 2000. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yusaa, Tarmizi & Andry. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Damai.

Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Wedayanti made devi. 2018. *Manajemen Corporate Social Responsibility*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Ismail, W William. 2007. *Implementasi pemerintahan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

### **Sumber Dokumentasi**

Buku Pedoman Kebijakan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa, 2013. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat.

### **Sumber Internet**

[administrasinegaradanpolitik.blogspot.com](http://administrasinegaradanpolitik.blogspot.com)

<https://www.neliti.com>

<https://jurnal.unigal.ac.id>

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

<https://media.neliti.com>